

Hermanita, S.E., M.M.

AGREE MEDIA
PUBLISHING



PEREKONOMIAN INDONESIA



Editor
Husnul Fatarib, Lc., MA., Ph.D.
Suci Hayati, MSI
Dr. Oriza Agustin, M. S.

PEREKONOMIAN INDONESIA

oleh:

HERMANITA, SE. M.M.



PEREKONOMIAN INDONESIA

Penulis : Hermanita, SE. M.M.
ISBN : 9786235726007
Editor : Suci Hayati, MSI
Husnul Fatarib, Lc., MA., Ph.D
Dr. Oriza Agustin, M.Si
Layout : Fajar Prasetya
Desain Sampul : Elin Wiji Astuti

Redaksi :

CV. Agree Media Publishing

Jl. Kepiting RT 012/RW 005

Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung

Kantor : Mondoliko 431A, Umbulharjo, Yogyakarta

Perwakilan

: Taman Lotus IV No. 30, Bekasi, Jawa Barat

: Jl. Rajin No. 239 Tanah Garam Solok

Sumatera Barat

Jl. Dwikora II Palopat Pijorkoling Kel. Padang

Sidimpunan Tenggara Kota Padang Sidimpunan,

Sumatera Utara

Email : agreemediapublishing@gmail.com

Penerbit **IKAPI**

Vi+ 210 hal; 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah mengkaruniakan nikmat iman dan Islam bagi kita semua. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing dan memberikan hidayah bagi umat manusia di muka bumi.

Buku ini hanyalah sebuah piranti yang disusun untuk memudahkan dalam penyampaian salah satu materi mata kuliah yang amat penting dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu negara, yakni *Perekonomian Indonesia*"

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan masukan dan bantuannya sehingga menambah kesempurnaan buku ini dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada rekan-rekan penulis yang telah setia memberikan dukungan terbaiknya selama proses penyelesaian buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik kepada para pembaca agar adanya perbaikan ke arah yang lebih lagi. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Wassalamu'alaikum Warramatullahi Wabarrakatuh

Metro, Desember 2021
Penulis

Hermanita, SE. MM

DAFTAR ISI

BAB I.	SEJARAH PEREKONOMIAN BARAT DAN PERKEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI, POLITIK DI INDONESIA.	
A.	Pemikiran ekonomi barat	
1.	Pemikiran ekonomi barat	2
2.	Pendapat dan kebijaksanaan ekonomi di barat	7
B.	Perkembangan sosial, politik dan ekonomi di Indonesian	
1.	Perkembangan social dan politik di Indonesia	15
2.	Perkembangan perekonomian Indonesia	18
BAB II	PERKEMBANGAN TEORI EKONOMI MAKRO TENTANG INFLASI DAN PENGANGGURAN	
A.	Perkembangan teori inflasi	
1.	Inflasi dalam negeri	25
2.	Inflasi yang diimpor	47
B.	Perkembangan teori pengangguran	50
BAB III	SISTIM PEREKONOMIAN INDONESIA	
A.	Dasar Filosofis	
1.	Pengertian sistim ekonomi	51
2.	Macam-macam sistim perekonomia	53
3.	Pengembangan sector swasta secara terkendali	64
B.	Dilematis sistim perekonomian campuran	
1.	Masihkan Indonesia menganut sistim ekonomi campuran	70
2.	Unsur moral dan social dalam Sistim ekonomi pancasila	71
C.	Sejarah sistim perekonomian Indonesia	
1.	Sebelum kemerdekaan	73
2.	Orde lama	74
3.	Orde baru	78
4.	Orde reformasi	78
D.	Dasar konstitusional	82
E.	Dasar operasional sistim ekonomi pancasila	84

BAB IV.	BANGUN-BANGUN USAHA EKONOMI NEGARA, SWASTA DAN KOPERASI	
A.	Sector koperasi	
1.	Pengertian koperasi	90
2.	Landasan koperasi Indonesia	91
3.	Fungsi koperasi	92
4.	Azas koperasi	92
5.	Sendi-sendi dasar koperasi	93
6.	Fungsi koperasi	95
7.	Pengembangan koperasi	96
B.	Sektor Usaha Swasta	
1.	Manajemen berazzaskan kekeluargaan	97
2.	Sektor formal dan informal	98
3.	Iklim penunjang usaha	100
4.	Kerjasama yang saling menguntungkan	102
5.	Iklim usaha yang memadai	103
C.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
1.	Jenis-jenis BUMN	104
2.	Peranan BUMN dalam Pembangunan	111
BAB V.	STRUKTUR EKONOMI INDONESIA INDUSTRI PERTANIAN DASAR	
A.	Proses transformasi structural	
1.	Struktur ekonomi Indonesia.	114
2.	Pembangunan pertanian	115
B.	Industri pertanian dasar	
1.	Strategi pembangunan pedesaan	122
2.	Pembangunan ekonomi skala besar	124
3.	Industry pertanian dasar	124
BAB VI.	KEBIJAKSANAAN EKONOMI	
A.	Kebijaksanaan Sektoral	
1.	Kebijaksanaan pembangunan sektoral	127
2.	Kebijaksanaan sektoral bidang ekonomi	129
B.	Kebijaksanaan Regional	
1.	Kebijaksanaan pembangunan daerah	154
2.	Pembiayaan pembangunan daerah	157
BAB VII.	STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL DAN KEMISKINAN.	
A.	Struktur produksi	162

1. GDP	167
2. GNP	167
3. NNP	168
4. NNI	168
5. PI	169
6. DI	169
7. Pendapatan Perkapita	170
B. Distribusi Pendapatan nasional	170
C. Distribusi pendapatan	173

BAB VIII.KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


A. Kemiskinan	
1. Definisi Kemiskinan	178
2. Penyebab kemiskinan	182
3. Factor-faktor penyebab kemiskinan	182
4. Ukuran kemiskinan	183
5. Strategi dalam mengurangi kemiskinan	183
B. Kesejahteraan	184

DAFTAR PUSTAKA



PEREKONOMIAN INDONESIA



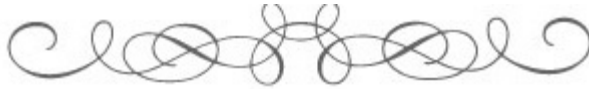


BAB I
SEJARAH PEREKONOMIAN
BARAT DAN PERKEMBANGAN
EKONOMI SOSIAL DAN POLITIK
DI INDONESIA



BAB I

SEJARAH PEREKONOMIAN BARAT DAN PERKEMBANGAN EKONOMI SOSIAL DAN POLITIK DI INDONESIA



A. SEJARAH PEREKONOMIAN BARAT

1. Pemikiran Ekonomi Barat

Ekonomi merupakan kata yang tidak asing bagi kita. Kata ekonomi sering kita pakai dalam kehidupan masyarakat, rumah tangga, pendidikan hingga dunia politik. Kata ekonomi mampu dipahami tetapi sulit untuk didefinisikan bagi masyarakat awam. Istilah ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu



oikonomia (400 tahun SM). Orang-orang Yunani kuno ini bisa dikatakan sebagai pelopor yang memulai pemikiran-pemikiran ekonomi di zamannya.

Oikonomia terdiri dari dua suku kata yaitu: ***Oikos***: Rumah tangga/ keluarga ***Nomos*** : peraturan/aturan/hukum.¹ Sehingga istilah ekonomi di sini berarti mengatur rumah tangga atau keluarga. Dalam kegiatan rumah tangga manusia selalu berusaha mencukupi kebutuhannya baik berupa barang ataupun jasa agar tercapai kemakmurannya.² Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga tentu saja rumah tangga yang dimaksud di sini bukan hanya rumah tangga yang merujuk pada satu keluarga tetapi rumah tangga yang lebih luas lagi yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.³

1) Perekonomian

Untuk mengerti tentang apa pokok persoalan ekonomi kita berpangkal dari dua kenyataan yaitu :

¹ Ashley Montagu, *The Cultured Man*, (New York: Public Affair Press, 1959), hlm. 289

² Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan*, (Jakarta: Mutiara, 1964), hlm. 12

³ Sastradipoera, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kappa-Sigma, 2001)



- 1) Untuk dapat hidup layak, kita membutuhkan serta menginginkan bermacam-macam hal; makanan, minuman, pakaian, rumah tangga, obat, pendidikan dan lain-lain. Kebutuhan (*needs*) manusia banyak dan beraneka ragam sifatnya. Apalagi keinginan (*wants*) bisa dikatakan tidak ada batasnya.
- 2) Tetapi sumber-sumber, sarana atau alat-alat yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang banyak itu, termasuk waktu yang tersedia itu terbatas atau langka, artinya kurang dari yang kita butuhkan atau kita inginkan, baik dalam hal jumlah, bentuk, macam, waktu dan tempat.

Dari dua kenyataan pokok tersebut, timbul pokok persoalan ekonomi yaitu: bagaimana dengan sumber-sumber yang terbatas tersebut, orang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang banyak dan beraneka ragam.⁴

Persoalan tersebut dihadapi oleh perorangan, keluarga, perusahaan, negara bahkan oleh dunia internasional. Untuk menghadapi persoalan itu maka timbul kegiatan ekonomi seperti konsumsi,

⁴ Abdullah, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: IKIP Bandung (1992), hlm: 6



produksi dan distribusi. Yang diatur dengan suatu cara berpikir dan bertindak yang disebut ekonomis atau menurut prinsip ekonomi.

1) Produksi :

Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa baik digunakan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dan dari kegiatan tersebut produsen mendapatkan balas jasa berupa laba yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Distribusi :

Kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan dengan kegiatannya tersebut distributor/pedagang mendapatkan laba yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Konsumsi :

Kegiatan ekonomi yang menggunakan langsung barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



2) Pandangan tentang Ekonomi dari segi Filsafat dan Etika

Seorang ahli filsafat bernama **Plato** memberikan pendapatnya tentang ekonomi yaitu :

- ✓ Ketidakadilan ekonomi dan penumpukan kekayaan yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya peperangan.
- ✓ Keserakahan atau keinginan untuk memiliki barang-barang melebihi kebutuhan yang layak merupakan rintangan besar bagi perdamaian (pemikiran Plato ini berdasarkan pada teori etika

Seorang filsuf lain yang bernama **Aristoteles** (abad 18) berpendapat bahwa; “Bidang studi tentang ekonomi adalah bidang studi tentang kekayaan”. Menurutnya uang mempunyai 3 fungsi yaitu sebagai alat tukar, pengukur nilai, dan penimbun kekayaan.⁵

Menurutnya uang juga tidak dapat berkembang biak dikenal dengan ungkapan “uang adalah mandul”. Jadi menurutnya bunga itu adalah suatu penipuan. Pendapat ini didukung pula oleh pendapat:

⁵ Silahkan baca 3.1.1.2 Aristoteles (384 SM – 322 SM)



ST. Thomas Aquinas yang bukan saja mengutuk bunga sebagai riba yang berlebihan tetapi juga berpendapat bahwa membungakan uang itu tidak adil karena sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada dan ini menjurus pada kesenjangan ekonomi.

2. Pendapat dan Kebijakan Ekonomi di Barat

Ada beberapa aliran yang mengemukakan mengenai Pendapat dan Kebijakan Ekonomi Barat antara lain:

a. Merkantiisme(1767)

Aliran yang memusatkan perhatiannya pada perdagangan (*Merchant* = Pedagang)

Pendapatnya :

Sumber kemakmuran adalah perdagangan luar negeri dan uang adalah sumber kekuasaan. Oleh karena itu aliran Merkantilisme (terutama Perancis) banyak menetapkan kebijakan antara lain:⁶

Kebijaksanaannya :

Dengan mendorong ekspor dan sebaliknya Impor barang dikenakan kewajiban-kewajiban yang berat atau sama sekali dilarang.

⁶ Silahkan baca Bab (pertemuan) 6: Aliran Klasik (Hukum Pasar Say)



Tokoh aliran ini : **Sir James Stuart**

Ajaran aliran ***Merkantilisme*** ini mengalami kegagalan dikarenakan pada saat itu dengan adanya keinginan yang kuat untuk mendorong ekspor sehingga menyebabkan timbulnya sistem kapitalisme sehingga banyak terjadi peperangan di Negara-negara Eropa.

Akhirnya pendapat dan kebijaksanaan aliran ini mulai menghilang seiring dengan munculnya aliran dan kebijaksanaan baru yang dikemukakan oleh ***Aliran Fisiokrat***.

b. Aliran Fisiokrat (1694-1774)

Pendapatnya :

Aliran Fisiokrat berpendapat bahwa sumber kemakmuran suatu Negara adalah kekayaan alam yang berkaitan erat dengan pertanian.

Kebijaksanaannya:

Membatasi campur tangan pemerintah hingga batas minimum. Demikian pula halnya dengan kehidupan ekonomi biarkanlah berjalan dengan sendirinya dalam kehidupan masyarakat tanpa campur tangan pemerintah. Menurutnya sistem perekonomian akan tercipta dengan baik dalam masyarakat jika campur



tangan pemerintah dibatasi dan membiarkan masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi dengan sendirinya antara lain biarkan mereka merdeka, perdagangan bebas, dsb, karena dunia akan berputar dengan sendirinya.⁷

Dia mengibaratkan kehidupan ekonomi sebagai tubuh manusia dan peredaran darahnya (karena dia adalah seorang dokter)

Tokoh aliran ini : **Francois Quesney**.

Kelemahan dan pendapatan dan kebijaksanaan aliran **Fisiokrat** ini adalah :

- ✓ Karena aliran ini mengabaikan campur tangan pemerintah sehingga para pelaku ekonomi/ usaha akan bersaing secara tidak sehat yang akan merugikan Negara-negara lain terutama Negara berembang.
- ✓ Alam ternyata bukan satu-satunya faktor produksi yang produktif, ini terbukti bahwa sebagian Negara-negara didunia tidak mengandalkan sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi negaranya (contohnya Jepang).

⁷ François Quesnay (1694–1774), in Steven G. Medema and Warren J. Samuels, *The History of Economic Thought: A Reader*, (London and New York: 2004), hlm: 95



- ✓ Anggapan sektor perdagangan dan industri adalah sektor yang tidak produktif itu adalah keliru.
- ✓ Kebijakan pemerintah lebih diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan petani, tanpa memperhatikan pekerja disektor lain.
- ✓ Selain itu luas wilayah di Negara-negara barat terbatas untuk lahan pertanian.

c. Aliran Klasik (1774 - 1883)

Pendapatnya :

Dalam buku “*The Wealth of Nations*” (yang dianggap sebagai pancangan pertama tonggak sejarah perkembangan ilmu ekonomi) ia memberikan istilah tentang : “***Invisible Hand***” (tangan yang tak tampak) yang bekerja dalam kehidupan ekonomi.

Menurutnya tangan ajaib itu bertindak sedemikian rupa sehingga walaupun setiap orang mengejar kesejahteraan untuk kepentingan pribadinya hingga batas maksimum tetap saja hasil bersih dari usaha-usahanya itu akan berupa kesejahteraan bagi masyarakat seluruhnya dan bukan untuk kesejahteraan pribadinya sendiri dan campur tangan pemerintah dibatasi.



Karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia selalu memerlukan orang lain, sehingga hasil dari usahanya tetap saja dirasakan oleh orang lain misalnya dengan membeli kebutuhan-kebutuhan hidup yang tidak bisa diciptakan sendiri dan dijual atau diciptakan oleh orang lain.

Pelopop Aliran ini : Adam Smith (Bapak Ilmu Ekonomi)

Yang dimaksud Adam Smith tangan yang tak tampak itu adalah **pasar**.

Kebijaksanaanya adalah :

Menekan campur tangan pemerintah hingga batas minimum.

Ada perbedaan yang dominan antara pola pikir Adam Smith dan kaum fisiokrat, terletak pada faktor yang paling dominan yang mempengaruhi perekonomian yaitu :⁸

- ✓ Kaum Fisiokrat percaya bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi perekonomian adalah alam.

⁸ Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations. Edited by S. M. Soares (Meta Libri Digital Library, 2007)
www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf



- ✓ Adam Smith meyakini bahwa manusia lah yang memiliki peranan lebih (logikanya bahwa alam tidak akan berguna apa-apa jika tidak ada manusia).
- ✓ Akan tetapi lagi-lagi pendapat dan kebijaksanaan aliran Klasik mengalami kegagalan karena ternyata di Negara-negara Eropa pada saat itu terjadi **Depresi Ekonomi** yaitu pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat. Sehingga pendapat dan kebijaksanaan aliran Klasik digantikan oleh aliran Keynesian.

d. Aliran Keynesian :

Teori Keynes ini memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hidup di dalam masyarakat pada waktu itu , jadi dapat disimpulkan bahwa teori Keynes bertentangan dengan teori Klasik perbedaannya adalah :

Teori Klasik berpendapat :

Walaupun setiap orang mengejar kesejahteraan sampai tingkat yang paling tinggi tetap saja hasil yang dicapai dari usaha tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.



Secara tidak langsung teori ini mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi pengangguran karena hasil dari usaha seseorang itu tetap saja untuk kesejahteraan masyarakat juga sehingga tidak memerlukan campur tangan pemerintah.

Pendapat teori Keynes :

Tingkat kemakmuran ekonomi suatu Negara tergantung pada tingkat pengeluaran (konsumsi) masyarakat dan sangat ditekankan pentingnya pemantauan dari masyarakat dan kebijaksanaan yang aktif dari pemerintah. Karena melihat kenyataan pada saat itu banyak terjadi pengangguran.

Kebijaksanaannya adalah :

Menekankan bahwa perlu adanya Campur tangan pemerintah dalam mengatur perekonomian.

Dengan demikian terjadi penolakan terhadap analisis klasik dan penerimaan analisis Keynes. Sehingga analisis Keynes terlahir dalam teori ekonomi.

Tapi akhirnya teori Keynes mengalami nasib yang sama dengan teori Klasik. Dimana prediksi Keynes berkali-kali meleset, bahkan disaat mulainya teori ini



pada waktu itu timbul pula *Stagnasi* dan tidak mempunyai kebijaksanaan Fiskal dan Moneter untuk menyelesaikan masalah Inflasi.

Tokoh aliran ini adalah : **Jhon Maynard Keynes**

Catatan :

Stagnasi :

Kondisi ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan Ekonomi yang lamban dan pengangguran yang tinggi.

Inflasi :

Kondisi dimana uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah barang yang beredar.

e. Aliran Neo Klasik (Klasik Baru)

Pandangan dan pendekatan oleh aliran klasik baru (Neo Klasik) dilakukan dengan menyanggah pendapat dan kebijaksanaan aliran Keynesian melalui pandangan dan pendekatan dari sisi **produksi/ Penawaran.**

Bukan terletak pada tingkat pengeluaran/ permintaan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Aliran Keynesian

Pendapatnya :



Yang harus mendapat perhatian utama bukan segi permintaan akan barang melainkan segi penawaran (*Supply side*) yang dimaksud penawaran disini adalah bukan penawaran barang dari dunia usaha tetapi ***penawaran kepada dunia usaha dari pemerintah***, dunia usaha swasta harus diberi kesempatan/penawaran sepenuhnya untuk meningkatkan produksi mengadakan ***investasi***, melakukan ***inovasi*** dan mengembangkan ***teknologi*** oleh pemerintah.

Kebijaksanaannya :

Untuk mengatasi Stagnasi (Inflasi dan pengangguran) cara yang ditempuh bukan dengan menambah pengeluaran pemerintah tapi dengan **menurunkan pajak** dengan demikian investasi dan produksi akan terdorong naik dan akan meredakan inflasi dan pengangguran.

B. PERKEMBANGAN SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI DI INDONESIA

1. Perkembangan Sosial dan Politik di Indonesia

Perkembangan sosial dan politik di Indonesia pada awal kemerdekaan (1946) sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP (Komisi nasional Indonesia Pusat)



yang mana posisi KNIP pada saat itu layaknya DPR untuk sementara waktu sebelum dilaksanakan PEMILU. Banyak bermunculan partai-partai politik dengan berbagai ideologi masing-masing yang mempunyai arah dan metode pergerakan yang berbeda.

- ✓ Pada Tahun 1955 diadakanlah PEMILU yang pertama kondisi sosial dan politik pada saat itu sangat diwarnai oleh kampanye yang dilakukan sampai ke pelosok-pelosok desa.
- ✓ Pada akhir tahun 1957 pada saat hubungan politik Indonesia-Belanda memburuk karena sengketa Irian Barat, Indonesia mempunyai alasan politis untuk mengambil alih seluruh kepentingan ekonomi Belanda dan menaruhnya langsung dalam manajemen pemerintahan Indonesia dan saat itulah dimulainya sejarah perusahaan negara di Indonesia. Sejak itulah dimulai sejarah Perusahaan di Indonesia (1957).
- ✓ Dalam memperebutkan Irian Barat Indonesia dibantu oleh PBB dan didukung oleh Negara-Negara Asia Afrika.
- ✓ Akan tetapi pada saat itu negara kita masih menghadapi penjajahan yang datangnya dari dalam negeri kita sendiri yaitu G 30 S/PKI, sehingga



pembangunan dinegara kita belum dapat dilakukan secara terencana.

- ✓ Baru pada masa berakhirnya G 30 S/PKI (1965) pemerintah kita mulai merencanakan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahap I (1969/1970-1994/1995) dimana PJP yang terdiri dari beberapa Repelita itu lebih diarahkan pada pembangunan fisik negara kita yaitu sektor pertanian dan industri.
- ✓ Kemudian setelah berakhirnya PJP I dilanjutkan lagi dengan PJP II (1994-1995/2019-2020), dimana pada PJP II ini lebih diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, karena kualitas SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam proses menjadi masyarakat yang maju dan mandiri serta tidak tergantung pada negara lain terutama dalam pengolahan SDA nya.
- ✓ Dalam pengembangan SDM, kita dapat melihat negara Jepang bagaimana Jepang setelah perang dunia ke II menjadi negara yang disegani dunia karena bangsa Jepang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan Teknologi. Walaupun Jepang tidak memiliki banyak sumber daya alam tetapi mampu menempati posisi paling atas dalam kompetisi perekonomian dunia.



Masyarakat yang Modern adalah negara yang telah menggunakan **Iptek** dalam segala aspek kehidupannya. Kemandirian yang dimaksud bukan berarti bersifat **Individualitas**, kemandirian disini maksudnya **mampu mengurus dirinya sendiri** dengan tetap membuka diri untuk arus keluar masuknya teknologi maupun modal dari negara luar, yang terpenting neraca akhirnya bukan suatu ketergantungan.⁹

2. Perkembangan Perekonomian Indonesia

Secara garis besar perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dibagi ke dalam siklus tujuh tahunan :¹⁰

a. *Ekonomi perang Gerilya (1945-1952)*

pada masa ini terjadi pembumihangusan prasaran ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dan tentara Gerilya Indonesia agar ekonomi dan politik penjajah menjadi terganggu dan kacau.

b. *Pembangunan ekonomi nasional (1952-1959)*

pada periode ini lahir perusahaan negara. Hasil pengambilalihan dari penjajah dimana

⁹ Sorokin, Pitirim A. 1957. *Social and Cultural Dynamics*. Boston: Sargent.

¹⁰ Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta



perekonomian kita bertumpu pada perkebunan-perkebunan modern yang ada di Jawa dan Sumatera. Konsentrasi program pemerintah waktu itu adalah; mengubah ekonomi Belanda menjadi ekonomi Indonesia atau dari ekonomi penjajah menjadi ekonomi merdeka.

c. Ekonomi terpimpin (1959-1966)

Indonesia menjalankan demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia mengarah kepada etatisme (pemerintah mengatur segalanya) Dalam periode ini perekonomian Indonesia memburuk akhirnya pemerintah orde baru “membanting setir”, kebijaksanaan ekonomi diubah secara drastis dari “tertutup” menjadi “terbuka” termasuk terhadap penanaman modal asing dari “terpimpin” menjadi “bebas demokrasi”.

d. Demokrasi Ekonomi (1966-1973)

Pada periode demokrasi ini dikatakan bahwa sejarah politik ekonomi yang lama dan yang baru sangat bertolak belakang sehingga pemerintah pun dikatakan pemerintah orde lama dan pemerintah orde baru. Sistem ekonominya pun sistem Demokrasi Ekonomi Pancasila dimana kebijaksanaan ekonominya diarahkan kepada



pembangunan di segala bidang, yang semuanya tertuang dalam PJP I.Indonesia

e. Ekonomi Bonansa Minyak (1973-1980)

Dikatakan Ekonomi Bonansa Minyak karena; pada periode ini perekonomian ini mengalami peningkatan yang cukup besar karena kenaikan harga minyak yang luar biasa pada tahun (1973-1974 dan 1979-1980). Tetapi hal tersebut justru membuat bangsa Indonesia menjadi manja dan boros karena pada waktu itu nilai ekspor kita yang mengalami peningkatan pesat yaitu 6,8% per tahun diikuti dengan peningkatan nilai impor yang lebih tinggi lagi yaitu 16,6% per tahun. Hal ini justru menyebabkan kondisi perekonomian kita cukup parah pada masa yang akan datang.

f. Ekonomi Pasca Bonansa Minyak (1980-1987)

Pada periode ini terjadi keprihatinan dimana pertumbuhan ekonomi merosot tajam. Bersamaan dengan itu nilai ekspor dan impor mengalami penurunan pula.

g. Pembangunan Ekonomi Indonesia (1987-1994)

Pada masa ini lembaga keuangan menjadi bertambah baik lembaga keuangan non bank maupun yang berbentuk ban. Baik yang swasta



maupun yang milik pemerintah. Pada masa 1987-1994 jumlah bank bertambah dari 111 bank menjadi 239 bank. Dimana jumlah bank-bank swasta meningkat lebih dari 2x lipat. Disini peranan bank pemerintah berkurang dibandingkan peranan bank swasta. Lembaga keuangan non bank pun bertambah seperti perusahaan asuransi dari 102 menjadi 151 perusahaan asuransi. Pembangunan Jangka Panjang tahap II (1994-2019) PJP II ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Jadi dapat dikatakan Indonesia pada era ini bukan lagi terkenal dengan negara agrarisnya tetapi juga menjadi negara industri baru karena sumbangan industri sudah melebihi sumbangan pertanian.

h. Reformasi Ekonomi

Pemerintah **BJ Habibie** yang pertama kali mengawali masa Reformasi sampai dengan pemerintahan **Abdurrahman Wahid** akan tetapi Pemerintah Indonesia tetap saja belum bisa menghadapi masalah keterpurukan ekonomi yang diwarisi oleh pemerintahan orde baru salah satunya adalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kemudian digantikan oleh kepemimpinan Presiden Megawati akan tetapi



pemulihan ekonomi pun tetap belum bisa dilakukan oleh pemerintahan ini walaupun pada masa kepemimpinannya direalisasikan tentang berdirinya KPK (komisi Pemberantasan Korupsi).

Masa kepemimpinan **Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)** dibuatlah kebijakan-kebijakan kontroversial yaitu menaikkan harga BBM hal ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan pada subsidi sektor pendidikan dan kesehatan antara lain BLT (Bantuan Langsung Tunai) dengan hal ini diharapkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan terjamin.


Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah dengan membangun infrastruktur misal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi salah satunya dengan diadakan *Indonesian Infrastructure Summit* pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-



kepala daerah.¹¹ Dan kita berharap kondisi perekonomian Indonesia akan semakin membaik.

¹¹ Soemardjan, S dan Breazeale, K. 1993. *Cultural Change in Rural Indonesia; Impact of Village Development*. Honolulu: UNS-YISS-East West Center.





BAB II
PERKEMBANGAN
TEORI EKONOMI MAKRO
TENTANG INFLASI DAN
PENGANGGURAN



BAB II

PERKEMBANGAN TEORI EKONOMI MAKRO TENTANG INFLASI DAN PENGANGGURAN



A. PERKEMBANGAN TEORI INFLASI

1. Inflasi dalam negeri

a. Definisi Inflasi

Menurut A.P Lerner bahwa fungsi inflasi adalah: Kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap penyediaan barang dalam suatu perekonomian



secara keseluruhan. Kelebihan permintaan akan barang dan jasa itu dapat dipandang sebagai:¹²

- 1) Kelebihan pemesanan akan barang tetapi tidak diikuti peningkatan faktor-faktor produksi seperti: tidak ada penambahan jam kerja, tidak ada penambahan mesin-mesin dsb.
- 2) Terlalu banyak uang yang beredar dibanding jumlah barang yang tersedia.

Definisi yang lain dikemukakan oleh F.W. Paish: Keadaan dimana pendapatan nominal (individu) jauh lebih cepat meningkat dengan peningkatan arus barang dan jasa yang tersedia.¹³ Banyak lagi definisi tentang inflasi tapi dari definisi itu menggambarkan tiga keadaan:

- 1) Adanya kecenderungan (*tendency*) harga-harga untuk meningkat.
- 2) Kenaikan harga-harga itu berlangsung berkelanjutan (*sustained increase*).

¹² Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi & Makroekonomi, Cet III (Jakarta: LPFE-UI, 2008), 359.

¹³ Yianis P. Venieris And Frederick D. Sebold, "Macroeconomics Models and Policy", dalam Makro Ekonomi: teori, masalah, dan kebijakan, ed. Muanga Nanga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 237.



- 3) Kenaikan harga bukan hanya pada suatu atau beberapa komoditi saja tapi pada tingkat harga umum atau seluruhnya

b. Macam-macam Inflasi

- 1) *Berdasarkan tingkat kualitas parah atau tidaknya*
Ada beberapa inflasi berdasarkan tingkat kualitas parah atau tidaknya yaitu:

✓ **Inflasi ringan**

Inflasi ringan atau inflasi merangkak (*creeping inflation*) adalah inflasi yang lajunya kurang dari 10% per tahun, inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan.

✓ **Inflasi sedang**

Inflasi ini memiliki ciri yaitu lajunya berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Tingkat sedang ini sudah mulai membahayakan kegiatan ekonomi. Perlu diingat laju inflasi ini secara nyata dapat dilihat gerak kenaikan harga. Pendapatan riil masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti buruh, mulai turun dan kenaikan upah selalu



lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan harga.¹⁴

✓ **Inflasi berat**

Inflasi berat adalah inflasi yang lajunya antara 30% sampai 100%. Kenaikan harga sudah sulit dikendalikan. Hal ini diperburuk lagi oleh pelaku-pelaku ekonomi yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan spekulasi.

✓ **Inflasi liar (*hyperinflation*)**

Inflasi liar adalah inflasi yang lajunya sudah melebihi dari 100% per tahun. Inflasi ini terjadi bila setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (*Hyperinflation*).

2) *Berdasarkan jenis-jenis Inflasi*

Jenis inflasi ini dibedakan menjadi dua :

- ✓ *Inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga (*price push inflation*).*

¹⁴ Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 333.



Seperti kenaikan harga bahan-bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya OPEC menaikkan harga minyak.

✓ *Inflasi yang disebabkan karena kenaikan upah (wages cosh inflation)*

misalnya karena kenaikan gaji pegawai negeri yang diikuti usaha-usaha swasta pula, maka harga-harga barang lain juga ikut naik.

Biasanya inflasi karena kenaikan upah atau gaji sangat ditakuti karena akan bisa menimbulkan inflasi secara berkelanjutan. Karena upah naik, harga-harga akan naik. Karena harga barang naik, maka upah harus dinaikkan dan ini kemungkinan akan terus berkelanjutan.

3) *Berdasarkan Asalnya*

Inflasi dari segi asalnya dapat dibedakan sebagai berikut :

✓ *Inflasi yang berasal dalam negeri*

Seperti defisit anggaran belanja Negara yang terus menerus. Dalam keadaan seperti ini biasanya pemerintah menginstruksikan Bank Indonesia mencetak uang baru dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Selain itu inflasi dari dalam negeri juga dapat



disebabkan oleh adanya gagal panen dan sebagainya.

✓ *Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation).*

Inflasi ini timbul karena adanya karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Inflasi seperti ini biasanya banyak dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang yang notabene sebagian besar usaha produksinya mempergunakan bahan dan alat dari luar negeri yang timbul karena dari adanya perdagangan internasional.

c. Sebab-sebab terjadinya inflasi

Tentang sebab-sebab terjadinya inflasi dapat di lihat melalui:

1) Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory*)

yang berdasarkan pada persamaan pertukaran (*Equation of Exchange*).

Teori kuantitas uang sederhana

Terjadinya inflasi dapat dijelaskan dengan menggunakan Persamaan Pertukaran dari Irving Fisher.



$$MV = PT$$

Di mana:

M = Jumlah uang beredar (*money supply*)

V = Kecepatan peredaran uang dalam suatu periode (*velocity of circulation*)

P = Tingkat harga rata-rata (*average price level*)

T = Jumlah transaksi yang terjadi dalam periode tertentu (*trade*)

MV = Menunjukkan pengeluaran uang untuk barang dan jasa

PT = Menunjukkan penerimaan uang hasil penjualan barang dan jasa

Dalam persamaan pertukaran jumlah uang yang beredar (M) dalam teori ini dianggap sebagai variabel Eksogen yaitu: Variabel yang di tentukan dil uar model (variabel tidak tetap) karena uang yang beredar (M) dapat ditambah melalui kebijaksanaan moneter pemerintah atau bank sentral dan dapat pula dikurangi dengan kebijaksanaan uang ketat.

Beberapa asumsi penting dalam teori ini adalah:

- a) Kecepatan peredaran uang (V) dan jumlah uang yang beredar (M) diasumsikan tidak saling tergantung (*independent*) atau tidak saling berpengaruh.



- b) Kecepatan peredaran uang (V) relatif konstan/stabil karena : sifat dari faktor-faktor yang menentukan kecepatan peredaran uang seperti : pola pengeluaran masyarakat, mekanisme pembayaran upah/gaji relatif tidak berubah.
- c) Sedangkan (M) dalam teori ini dianggap variabel yang tidak tetap karena uang yang beredar (M) dapat ditambah melalui kebijaksanaan moneter pemerintah dan dapat pula dikurangi dengan kebijaksanaan uang ketat.
- d) Harga (P) bersifat fleksibel/ harga bergerak naik turun.
- e) Perilaku transaksi perdagangan (T) dalam teori ini dibedakan antara perilaku jangka panjang (*long run*) yang mencakup kebutuhan perlengkapan dan jangka pendek (*short run*) mencakup kebutuhan-kebutuhan pokok.

Akhirnya bila dalam persamaan $MV=PT$ dimana kecepatan peredaran uang (V) dan volume transaksi perdagangan (T) relatif tidak berubah atau stabil.



Maka hubungan yang ada dalam persamaan pertukaran itu hanya diantara jumlah uang yang beredar (M) dan tingkat harga (P). Dengan demikian setiap perubahan jumlah uang yang beredar menyebabkan terjadinya perubahan tingkat harga sebagai contoh bila pemerintah menambah jumlah uang yang beredar (M) sebanyak a kali maka tingkat harga (P) pun naik sebanyak a kali pula.

Jelas kalau pemerintah menambah jumlah uang yang beredar secara terus menerus maka tingkat harga pun akan naik terus berarti akan timbul inflasi.

Ex : Gaji naik = Harga barang naik.

2) Analisis Orthodox tentang inflasi (*Orthodox analysis of inflation*)

Analisis Orthodox tentang inflasi yang terdiri atas:

- ✓ Teori terikan permintaan tentang inflasi (*demand-full theories of inflation*)
- ✓ Teori sisi penawaran tentang inflasi (*supply-side theories inflation*)
- ✓ Teori permintaan-penawaran tentang inflasi (*demand-supply side of inflation*).



a) Teori tarikan permintaan tentang inflasi (*demand full theories of inflation*)

- ✓ Menurut teori ini inflasi dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan yang lebih besar dari pada penawaran.
- ✓ Hal tersebut dapat terjadi karena pendapatan nominal masyarakat meningkat sehingga jumlah permintaan akan barang pun akan meningkat pula.
- ✓ Kalau peningkatan jumlah permintaan akan barang ini tidak diiringi dengan kenaikan penawaran maka harga barang akan tinggi.
- ✓ Dan hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya inflasi dimana jumlah barang sedikit sedangkan permintaannya banyak.

b) Teori sisi Penawaran tentang inflasi (*supply side theories on inflation*)

Menurut teori ini inflasi dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya penurunan dari sisi penawaran sehingga jumlah permintaan akan barang tidak dapat dipenuhi (jumlah barang menurun walaupun permintaan tetap).

Hal tersebut dapat terjadi karena :



- ✓ Tingkat upah naik (karena desakan tenaga kerja) sehingga pengusaha melakukan pengurangan tenaga kerja yang otomatis mengurangi jumlah produksi.
 - ✓ Bisa juga terjadi karena harga-harga barang impor yang merupakan bahan baku produk (masih dibeli dari luar negeri) meningkat sehingga menyebabkan harga barang meningkat pula atau bisa juga menyebabkan para pengusaha mengurangi hasil produksinya karena keterbatasan modal dalam pembelian bahan baku tersebut.
 - ✓ Penyebab lain yaitu peningkatan pajak dari pemerintah sehingga menyebabkan kelesuan di kalangan produsen.
- c) Teori terikan permintaan-Penawaran tentang inflasi
- ✓ Menurut teori ini inflasi dapat disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan dan kemudian diiringi oleh adanya peningkatan penawaran, sehingga menyebabkan harga naik lebih tinggi.
 - ✓ Suatu keadaan dimana jumlah permintaan tinggi dan mampu diiringi oleh jumlah



penawaran yang tinggi pula itu akan menghasilkan suatu kondisi yang baik.

- ✓ Akan tetapi kalau diiringi dengan kenaikan harga maka akan menimbulkan terjadinya inflasi.
- ✓ Karena permintaan akan barang tersebut akan menurun dan seterusnya jumlah penawaran akan menurun pula melebihi jumlah permintaan sehingga menimbulkan terjadinya inflasi.

d. Pengaruh Inflasi

Inflasi dapat menyebabkan perekonomian tidak berkembang secara normal.¹⁵ Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi dapat membawa pengaruh sebagai berikut :

1) Inflasi mendorong penanaman modal spekulatif

Pada saat inflasi, para pemilik modal cenderung melakukan investasi spekulatif, misalnya dengan cara membeli tanah, rumah, atau menyimpan barang-barang berharga yang lebih menguntungkan bila dibandingkan melakukan investasi produktif yang belum tentu akan

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, Teori Makro Ekonomi Islam : Konsep, Teori, dan Analisis (Bandung: ALFABETA, 2010), 94-96



memberikan kontribusi positif untuk selanjutnya.

2) *Inflasi menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan*

Inflasi akan semakin berkembang bila tidak di kendalikan. Gagal mengendalikan inflasi akan menimbulkan ketidakpastian ekonomi serta sulit di ramalkan sehingga akan dapat mengurangi kegairahan pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

3) *Inflasi menimbulkan masalah neraca pembayaran*

Inflasi menyebabkan harga barang-barang impor lebih murah bila dibandingkan dengan harga barang produksi dalam negeri. Maka impor berkembang lebih cepat, tetapi ekspor akan bertambah lambat. Dengan demikian arus modal ke luar negeri akan lebih banyak dari pada yang masuk ke dalam negeri. Keadaan seperti ini akan mengakibatkan terjadinya defisit neraca pembayaran dan kemerosotan nilai mata uang dalam negeri.



e. Akibat Inflasi.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif,¹⁶ tergantung parah atau tidaknya inflasi.

- ✓ **Apabila inflasi itu ringan**, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.
- ✓ **Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah**, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat.¹⁷ Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga

¹⁶ Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi., 371-372

¹⁷ Rafiq al-Masri, a paper submitted in the second Workshop on inflation: Inflation and Its Impact on Societies – The Islamic Solution, dalam Teori Makro Islam : Konsep, Teori dan Analisis, ed. M. Nur Rianto Al Arif (Bandung: ALFABETA, 2010), 100.



sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari inflasi antara lain:

1) Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Dalam keadaan inflasi nilai harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan, pertokoan dan sebagainya akan mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga tersebut sering kali lebih cepat dari kenaikan inflasi itu sendiri. Sebaliknya pendapatan riil penduduk berpenghasilan rendah merosot. Dengan demikian maka inflasi memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan antara anggota-anggota masyarakat

2) Pendapatan Riil Merosot

Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 - atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah.



Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hal tersebut biasanya dalam masa inflasi kenaikan harga cenderung selalu mendahului kenaikan pendapatan. Dengan demikian inflasi cenderung menimbulkan kemerosotan pendapatan riil sebagian besar tenaga kerja. Ini berarti kemakmuran masyarakat merosot.

3) Nilai Riil Tabungan Merosot

Bagi masyarakat yang menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk deposito dan tabungan di Bank, dalam masa inflasi nilai riil tabungan tersebut akan merosot, tidak hanya itu masyarakat yang memegang uang tunai pun akan dirugikan karena penurunan nilai riilnya. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.



4) Bagi orang yang meminjam uang dari bank atau debitur inflasi menguntungkan

Hal saat pembayaran hutang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.

5) Bagi produsen

Inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).



Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum terdapat dua kebijakan yang dilakukan untuk menekan laju inflasi diantaranya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.:

1) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh penguasa moneter biasanya bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar sehingga akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.¹⁸ Ada beberapa macam kebijakan moneter yaitu:

✓ Politik Diskonto

Politik diskonto (*discount policy*) adalah politik bank sentral untuk mempengaruhi

¹⁸ Mulia Nasution, *Ekonomi Moneter: Uang dan Bank* (Jakarta: Djambatan, 1998), 225.



peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, karena orang akan lebih banyak menyimpan uangnya di Bank dari pada menjalankan investasi. Sebaliknya, Bank sentral akan menurunkan suku bunga jika timbul deflasi (yang akan dibahas lebih dalam pada halaman berikutnya). Dengan diturunkannya suku bunga diharapkan masyarakat akan menarik uangnya dari bank karena bunga tidak memadai.

✓ **Kebijakan Pasar Terbuka**

Untuk memperkuat politik diskonto, kebijakan lain juga di jalankan yaitu dengan politik pasar terbuka (*open market policy*) yaitu dengan jalan membeli atau menjual surat-surat berharga. Dengan membeli surat-surat berharga di harapkan uang yang beredar di masyarakat bertambah, selanjutnya bila apabila dengan menjual surat-surat berharga diharapkan uang



beredar di masyarakat dapat tersedot dari masyarakat.¹⁹

✓ **Kebijakan Persediaan Kas (*cash ratio policy*)**

Bank sentral pada umumnya menentukan *cash ratio* yaitu angka perbandingan minimum antara uang tunai yang dimiliki oleh bank umum dengan jumlah uang giral (cek, giro dan sebagainya) yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan.

✓ **Perubahan Cadangan Minimum**

Perubahan cadangan minimum yang dimiliki oleh bank-bank umum dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apabila ketentuan cadangan minimum diturunkan ,jumlah uang yang beredar cenderung naik dan sebaliknya jika cadangan minimum dinaikkan jumlah uang yang beredar cenderung turun.

2) Kebijakan Fiskal

✓ **Pengaturan Pengeluaran Pemerintah**
Pengaturan

¹⁹ Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis (Jakarta: Kencana, 2008), 182-183.



pengeluaran sangat perlu di lakukan. Dalam hal ini diharapkan penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Kalau pembelanjaan Negara melampaui batas yang telah ditentukan akan mendorong terjadinya pertambahan uang yang beredar begitu juga sebaliknya.

✓ **Menaikkan Tarif Pajak**

Saat terjadi inflasi uang beredar lebih banyak. Jumlah uang beredar tersebut dapat dikurangi dengan jalan menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak dinaikkan uang yang dibelanjakan oleh masyarakat berkurang. Namun harus diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan perlu diperhatikan golongan masyarakat mana yang dinaikkan pajaknya.

✓ **Mengadakan Pinjaman Pemerintah.**

Pemerintah dapat mengadakan pinjaman pemerintah baik dengan jalan paksaan ataupun tidak, untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Cara yang paling ampuh dilakukan untuk menyukseskan kebijakan ini yaitu dengan jalan membekukan



simpanan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di bank. Dapat juga ditempuh dengan jalan memotong gaji pegawai negeri untuk di tabung.

3) Kebijakan Non-Moneter

✓ **Menaikkan Hasil Produksi**

Kenaikan hasil produksi dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan hasil produksi dapat dilakukan dengan cara kebijakan penurunan bea masuk. Hal ini akan berakibat impor barang meningkat. Pertambahan jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

✓ **Kebijakan Upah**

Kebijakan upah adalah tindakan menstabilkan upah dan gaji dengan cara gaji tidak sering dinaikkan. Kenaikan gaji dan upah akan menimbulkan kenaikan daya beli. Hal ini pada akhirnya menaikkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan. Apabila hal ini terjadi, maka akan menimbulkan inflasi.

✓ **Pengaman harga dan distribusi barang**



Pemerintah harus dapat mengendalikan kenaikan harga berbagai macam barang. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan harga maksimum (harga eceran tertinggi), melakukan pengamanan harga, menetapkan sanksi yang cukup berat. Apabila penetapan harga tidak disertai dengan pengamanan yang baik, maka tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Namun, kadang-kadang pengamanan harga oleh pemerintah sering menimbulkan pasar yang tidak diinginkan. (pasar gelap).

f. Pengertian Deflasi

Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode dimana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Ada pula deflasi didefinisikan sebagai meningkatnya permintaan terhadap uang berdasarkan jumlah uang yang berada di masyarakat.

2. Inflasi yang diimpor



Pekanya perekonomian Indonesia terhadap pengaruh globalisasi ekonomi disebabkan karena sangat terbukanya perekonomian Indonesia. Keterbukaan perekonomian Indonesia ini tercermin pada cukup tingginya Rasio perdagangan laut negeri terhadap produksi nasional dicerminkan oleh : persentase produksi nasional untuk impor lebih besar dari pada persentase produksi nasional untuk ekspor.

Fluktuasi atau naik turunnya harga komoditi impor maupun ekspor di pasaran dunia atau turut mempengaruhi tingkat harga umum dalam negeri sehingga terjadi inflasi. Peningkatan harga impor dapat mempengaruhi tingkat harga umum melalui 3 jalur, yaitu:

1. Jalur langsung menaikkan harga umum
2. Peningkatan biaya-biaya faktor produksi antara lain: Biaya bahan baku dan barang-barang modal yang masih diimpor.
3. Melalui pengeluaran biaya-biaya impor, bea cukai dll, yang akan dibebankan pada biaya produksi dan selanjutnya pada harga barang.

Inflasi yang terjadi di luar negeri akan menaikkan biaya/harga barang-barang impor di dalam negeri



sehingga dapat menyebabkan inflasi. Inflasi ini disebut: inflasi tarikan biaya impor.

B. PERKEMBANGAN TEORI PENGANGGURAN

Antara teori pengangguran dan laju inflasi terjadi hubungan berkebalikkan (*grade off*). Dimana bila laju inflasi rendah maka tingkat pengangguran tinggi dan sebaliknya. Artinya:

- ✓ Bila permintaan akan barang sedikit dan barang banyak (laju inflasi rendah) maka akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran.
- ✓ Bila permintaan banyak dan barang sedikit (laju inflasi tinggi) maka tingkat pengangguran akan turun.





BAB III
SISTEM PEREKONOMIAN
INDONESIA



BAB III

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA



A. DASAR FILOSOFIS

1. Pengertian Sistem Ekonomi

Apakah sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah strategi/ cara suatu Negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran.²⁰ Sistem ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk menjawab masalah-masalah pokok ekonomi yaitu:

- a. barang dan jasa apa yang akan diproduksi,

²⁰ Edy Suandi Hamid, Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 29



- b. bagaimana cara memproduksi, dan
- c. untuk siapa barang dan jasa diproduksi.

Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang memengaruhi sistem ekonomi suatu negara adalah sebagai berikut ini.

- a. Falsafah dan ideologi yang dianutnya.
- b. Sistem pemerintahan.
- c. Sistem politik suatu negara.

Adapun faktor-faktor eksternal yang memengaruhi sistem ekonomi antara lain sebagai berikut.

- a. Pengaruh sistem ekonomi yang dianut negara lain.
- b. Pengaruh politik dunia internasional.
- c. Pengaruh sosial budaya luar negeri.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.²¹ Kegiatan ini timbul karena adanya persamaan dalam usaha pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Namun, manusia memiliki cara-cara yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan, termasuk alat dan cara mendistribusikan kebutuhan. Perbedaan tersebut

²¹ Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi*, in-trans publishing, Malang, 2008, hlm. 124.



menimbulkan berbagai bentuk dan sistem ekonomi yang berlaku di setiap negara.

Sistem pada dasarnya merupakan suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek dan perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dengan demikian, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. ²²Pelaksanaan suatu sistem ekonomi di suatu negara didasari oleh ideologi, cara pandang (filosofi), agama, dan kepentingan politik yang berlaku di negara tersebut.

2. Macam-macam Sistem Perekonomian

Sistem perekonomian di berbagai Negara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam dimana perbedaannya berdasarkan pada:

- a. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.
- b. Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetensi satu sama lain.

²² Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 73.



- c. Kadar peranan pemerintahan dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

Dari perbedaan di atas, sistem perekonomian dibagi menjadi:

a. Sistem Perekonomian Kapitalisme / Liberal/ Pasar

Sistem ekonomi Kapitalisme disebut juga sistem ekonomi Liberalisme dan pasar bebas.. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi liberal adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan memperoleh keuntungan juga. Dengan demikian setiap orang akan bebas bersaing dengan orang lain dalam bidang ekonomi.



Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nation* (1776) juga menunjukkan bahwa kebebasan berusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar bebas ini dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan perekonomian.

Mungkin kalian akan bertanya, bagaimanakah peran pemerintah dalam sistem ekonomi liberal? Pemerintah sama sekali tidak campur tangan dan tidak pula berusaha memengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana sumber-sumber daya tersebut akan digunakan.

Ciri-Ciri Sistem perekonomian Kapitalisme

- 1) Mengakui kepemilikan individu terhadap sumber daya –sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Setidaknya terdapat keleluasaan yang sangat longgar bagi orang perorangan untuk memiliki sumber daya.



- 2) Kompetensi individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan persaingan badan usaha dalam memperoleh keuntungan sangat dihargai.
- 3) Campur tangan pemerintah atau Negara sangat minim pemerintah lebih berkedudukan sebagai “pengamat” dan “pelindung” perekonomian.
- 4) Contoh Negara yang menganut sistem perekonomian adalah **Amerika Serikat, Jepang, Australia**

Berdasarkan ciri-ciri di atas, sistem ekonomi kapitalis memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan sistem ekonomi kapitalis :

- 1) Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya alam.
- 2) Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.
- 3) Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang.
- 4) Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Kekurangan sistem ekonomi kapitalis:



- 1) Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin.
- 2) Mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat.
- 3) Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah.
- 4) Sulit terjadi pemerataan pendapatan.

b. Sistem Ekonomi Sosialisme/ Komunisme/ Etatisme

Sistem ekonomi ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- ✓ Sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi di klaim sebagai milik Negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan.
- ✓ Kompetensi individu atau badan-badan usaha dalam memperoleh keuntungan diatur oleh Negara.
- ✓ Kadar campur tangan pemerintah sangat tinggi semuanya persoalan pokok perekonomian serba diatur dan direncanakan oleh pemerintah, mulai dari apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa diproduksinya.



- ✓ Contoh Negara yang menganut sistem perekonomian ini adalah **RRC** dan **Rumania**.

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosialisme

Sistem ekonomi sosialis memiliki ciri-ciri di antaranya:

- 1) Dalam masyarakat sosialis hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan.
- 2) Alokasi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara.
- 3) Negara memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian.
- 4) Pemerintah membantu kebebasan individu untuk melakukan aktivitas usaha.

Kelebihan dan Kelemahan *Sistem Ekonomi Sosialis*

Sistem ekonomi sosialis yang diterapkan di suatu negara memiliki beberapa **kelebihan**, di antaranya:

- 1) Pemerintah dapat mengatur jenis-jenis produksi dan distribusi barang atau jasa yang dihasilkan;



- 2) Pengendalian dan pengawasan kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan mudah oleh pemerintah;
- 3) Kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan yang miskin dapat dikurangi;
- 4) Pemanfaatan sumber daya ekonomi dapat terkendali;
- 5) Adanya rasa kebersamaan di antar warga masyarakat.

Selain memiliki kelebihan, sistem ekonomi sosialis memiliki beberapa **kelemahan** di antaranya:

- 1) Hak milik perorangan tidak diakui;
- 2) Potensi, inisiatif, dan daya kreatif individu tidak berkembang;
- 3) Kegiatan ekonomi didominasi oleh negara;
- 4) Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan negara menambah beban kerja pemerintah.

Negara-negara yang menerapkan atau menganut sistem ekonomi sosialis, di antaranya Kuba dan Korea Utara.



c. Sistem Ekonomi Komando (Terpusat)

Sistem ekonomi komando (terpusat) sering digunakan untuk menggambarkan sistem ekonomi mengenai barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan anggota masyarakat. Dengan kata lain, sistem ekonomi komando adalah suatu sistem perekonomian pemerintah yang berperan sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi komando merupakan sistem yang paling ekstrem dari sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi ini kali pertama dicetuskan oleh Karl Marx, seorang ekonomi asal Uni Sovyet (Rusia). Sistem ekonomi komando memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan.
- 2) Prinsip keadilan yang dianut, yaitu setiap orang menerima imbalan yang sama.
- 3) Campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi sangat dominan.



- 4) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur oleh negara.
- 5) Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan *ciri-ciri yang telah diuraikan, sistem ekonomi komando memiliki **kelebihan** di antaranya:*

- 1) Pemerataan pendapatan dan distribusi barang kepada masyarakat dapat dicapai;
- 2) Perekonomian akan lebih mudah dikendalikan;
- 3) Pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kegiatan ekonomi.

Namun, sistem ekonomi komando juga memiliki beberapa **kelemahan**, yaitu sebagai berikut.

- 1) Individu atau masyarakat tidak diberikan kebebasan dalam mengelola sumber daya ekonomi karena sepenuhnya diatur oleh pemerintah.
- 2) Pemanfaatan sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.



- 3) Ekonomi berjalan stagnan (diam di tempat) karena campur tangan pemerintah yang terlalu dominan.
- 4) Kualitas barang yang dihasilkan rendah karena diproduksi dalam jumlah banyak.

d. Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis, maupun komando (terpusat). Sistem ekonomi syariah bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, dan komando yang ekstrem.

Perekonomian dalam syariah harus mampu berikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Sistem ekonomi syariah diterapkan di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.²³

²³ Ali Hasan, Managemen Bisnis Syariah, Kaya didunia hormat di akhirat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 143.



Sistem ekonomi syariah menekankan empat sifat, di antaranya:

- 1) kesatuan (*unity*);
- 2) keseimbangan (*equilibrium*);
- 3) kebebasan (*free will*);
- 4) tanggung jawab (*responsibility*).

e. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi campuran memiliki ciri-ciri di antaranya:

- 1) Adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian, tetapi tidak dominan;
- 2) Keberadaan pihak swasta diakui sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonomi;
- 3) persaingan dan usaha di perbolehkan, tetapi melalui pengawasan pemerintah dan tidak merugikan masyarakat.

Pada umumnya, sistem perekonomian campuran banyak diterapkan negara-negara berkembang seperti Malaysia, Brunei Darussalam, India, dan Kanada. Dalam pelaksanaannya sistem ekonomi campuran memiliki kelebihan di antaranya:



- 1) Kegiatan ekonomi antara swasta dan pemerintah terpisah secara jelas;
- 2) Kegiatan ekonomi yang dilakukan swasta dan pemerintah sama-sama menguntungkan;
- 3) Kegiatan ekonomi yang dilakukan swasta terikat oleh aturan yang dibuat pemerintah;
- 4) Penggunaan faktor-faktor produksi, terutama tenaga kerja diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

3. Pengembangan Sektor Swasta Secara Terkendali.

Sistem ekonomi Pancasila di negara kita juga memberikan peluang seluas-luasnya bagi perkembangan dan kegiatan individu sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing. Dalam sistem ini diperlukan mekanisme yang bisa mengendalikan praktik Oligopoli dan Monopoli. Tapi perlu diketahui pula bahwa sektor swasta peranan positifnya cukup besar dalam pengembangan ekonomi Negara kita.

Cara bangsa Indonesia mewaspadaai timbulnya *oligopoly* dan monopoli yaitu dengan cara menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem perekonomian diindonesia berdasarkan pada Pancasila dan asas kekeluargaan serta gotong royong merupakan dasar



bagi berjalannya suatu sistem perekonomian, dan koperasi merupakan badan usaha yang cocok untuk itu.

Dan peranan sektor Negara sangat kuat dalam pembangunan ekonomi sehingga cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara sehingga menutup kemungkinan terjadinya *oligopoly* dan monopoli yang dapat merusak sistem perekonomian Indonesia. Namun demikian peranan swasta dalam pembangunan ekonomi tetap diakui di Indonesia.

Adapun kelemahan dari sistem ekonomi campuran, di antaranya:

- a. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang lebih berat daripada sektor swasta;
- b. Adanya anggapan, status pegawai negeri yang lebih tinggi dari pegawai swasta;
- c. Pengelolaan sektor produksi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

B. DILEMATIS SISTEM EKONOMI CAMPURAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran tersebut timbul sebagai akibat dari kegagalan sistem ekonomi pasar yang terlalu ketat, demikian



juga dengan sistem ekonomi terencana yang tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat sehingga muncullah sistem ekonomi campuran.²⁴

Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan seputar perekonomian yang timbul sebagian dapat dipecahkan melalui mekanisme pasar dan sebagian lagi dapat dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat. Kemudian sistem perekonomian Indonesia mengarah kepada suatu bentuk sistem baru yang disebut sistem ekonomi Pancasila sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup dari negara kita.

Sistem ekonomi Pancasila memiliki ciri sebagai berikut :

- 1) Pemilihan barang konsumsi bebas terkendali
- 2) Pemilihan faktor produksi negara, swasta, dan koperasi
- 3) Mekanisme pembentukan harga barang pasar terkendali
- 4) Pengambilan keputusan desentralisasi, musyawarah untuk mufakat
- 5) Insentif material dan moral

Mengenai sistem perekonomian Indonesia saat ini, dengan adanya kenyataan-kenyataan seperti banyaknya

²⁴ Buyung Syafei, Sekali Lagi Tentang Sistem Perekonomian, (<http://deroe.wordpress.com/2009/02/13/sekali-lagi-tentang-sistem-perekonomian/> diakses pada tanggal 15 Juni 2009).



pengangguran, kaum pemodal semakin berkuasa, yang miskin semakin miskin, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, bahkan negara kita juga dihadapkan pada kesenjangan sosial. Bila kita telaah lagi lebih dalam, ternyata sistem perekonomian Indonesia saat ini hampir mirip dengan sistem perekonomian kapitalis.

Dapat kita lihat suatu kenyataan di Indonesia dapat dihitung dengan jari jumlah para konglomerat yang menguasai perekonomian. Hanya segelintir orang yang menguasai perekonomian di Indonesia. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuensi kita menganut sistem ekonomi kapitalis, walaupun pemerintah tidak secara terang-terangan menyatakannya. Namun pada praktiknya, dapat terlihat jelas sistem ekonomi liberal atau kapitalis inilah yang sebenarnya dijalankan di Indonesia.

Maka dari kenyataan itu, sudah saatnya para ekonom kita mencoba mendaur ulang sistem ekonomi yang akan dijalankan di Indonesia di masa yang akan datang. Agar rakyat Indonesia ditempatkan sebagai rakyat yang berhak merasakan kesejahteraan dengan nyata. Saatnya kita untuk menganut sistem ekonomi mandiri yang berkeadilan sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia. Ke depannya diharapkan kepada negara kita untuk tidak menerapkan secara mentah-mentah dan



membabi buta sistem ekonomi yang berasal dari negara asing yang jelas-jelas telah menyengsarakan rakyat Indonesia.

Gambaran sistem ekonomi yang berjalan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu ketika beliau mengeluarkan kebijakan kontroversial mengenai pengurangan subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial, hal tersebutlah yang menjadikan kebijakan ini menjadi kontroversial.

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Kemudian pemerintah mengadakan Indonesian *Infrastructure Summit* pada bulan



November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini menyebabkan kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, dimana keadaan tersebut mengharuskan adanya revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, hal itu akibat adanya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin meningkat tajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), hal tersebut berimbas pada turunnya investasi.

Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif. Maka dapat digambarkan



oleh para pengamat bahwa sistem ekonomi Indonesia sebagai sintesis(percampuran) kapitalisme dan sosialisme, namun bukan berarti menyingkirkan aspek-aspek lain yang membangun sistem perekonomian Indonesia. Dengan mengadopsi kebaikan-kebaikan yang ada pada dua sistem tersebut maka terbentuklah sistem perekonomian di Indonesia yang disebut sistem ekonomi Pancasila. Tentunya dalam pembentukannya selalu terjadi bongkar-pasang untuk mendapatkan kesesuaian.²⁵

1. Masihkah Indonesia Menganut Sistem Ekonomi Pancasila?

Berbicara mengenai sistem ekonomi Indonesia, sudah sedari awal sekolah kita diajar bahwa Indonesia tidak menganut sistem ekonomi liberalisme maupun etatisme. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang berasas kerakyatan. Namun, dalam praktik, kapitalisme atau mungkin bisa disebut dengan neoliberalisme lah yang banyak bermain.

²⁵ Lestariningsih, Penerapan Peranan Good Corporate Governace dalam Pengembangan Perusahaan Publik, Surakarta: Spirit Publik, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2008, hal. 115.



2. Unsur Moral dan Sosial dalam Ekonomi Pancasila

Secara teori, Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila, merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.

Sistem ekonomi ini memiliki lima ciri utama, yaitu:

- a. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
- b. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme).
- c. Sesuai asas-asas kemanusiaan.
- d. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.
- e. Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama.

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi campuran. Namun dalam sistem ekonomi tersebut mengandung ciri-ciri positif dari kedua sistem ekstrem yang dikenal yaitu kapitalis-liberalis dan sosialis-komunis (Mubyarto, 1980).

Peranan unsur agama sangat kuat dalam konsep Ekonomi Pancasila. Karena unsur moral menjadi salah



satu pembimbing utama pemikiran dan kegiatan ekonomi. Jika dalam ekonomi Smith unsur moralitasnya adalah kebebasan (liberalisme) dan ekonomi Marx adalah diktator mayoritas (negara) maka moralitas Ekonomi Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Melihat penerapan ekonomi Pancasila kita yang masih amburadul, Sistem ekonomi Pancasila yang katanya kita anut ternyata tidak kita terapkan dengan semestinya. Bahkan masih jauh dari konsep awalnya. Ia hanya sebatas simbolisme formal dalam setiap seremoni kenegaraan.

Berkaca pada kondisi masyarakat Indonesia sekarang serta mengintip sejarah sistem perekonomian kita sejak merdeka hingga sekarang. Sudah seharusnya kita mengevaluasi diri, sebenarnya kita menganut sistem ekonomi yang mana? Bagaimana dengan sistem ekonomi Pancasila? Akankah hal tersebut hanya sebuah konsep yang masih diawang-awang? Lalu, mau dibawa ke mana Indonesia, jika asas dasarnya saja tidak dipakai dengan baik?

Konsep ekonomi Pancasila yang sejak awal digariskan oleh Profesor Mubyarto, unsur moral dan sosial merupakan unsur yang banyak bermain di dalamnya. Dengan memperhatikan nilai-nilai tersebut,



budaya korupsi tak akan mengakar, dan orang kaya pun tetap akan melirik rakyat miskin. Sudah selayaknya konsep bagus dari Profesor Mubyarto ini tidaklah kita abaikan begitu saja menjadi sebuah catatan. Jika kita memang menganut sistem ekonomi Pancasila, sudah seharusnya filosofi dalam sistem tersebut kita terapkan.

C. SEJARAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Sebelum Kemerdekaan

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisis sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang



mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).²⁶

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilisme benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).

Wewenang tersebut seolah-olah melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC, kenyataannya sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah²⁷

2. Orde Lama

a. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

²⁶ Satjipto Rahardjo, “Polisi dan Masyarakat Indonesia”, dalam Mochtar Lubis (Ed), Citra Polisi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, hlm. 174.

²⁷ Djiwandono, J Soedjati dan T.A Legowo, Revitalisasi Sistem Politik Indonesia, Jakarta: CSIS, 1996, hlm. 34.



Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

1) *Inflasi yang sangat tinggi*

Hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang *De Javasche Bank*, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (*Allied Forces for Netherlands East Indies*/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

2) *Adanya blokade ekonomi oleh Belanda*

Sejak November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.



3) *Kas negara kosong.*

4) *Eksplorasi besar-besaran di masa penjajahan.*

b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan *laissez faire laissez passer*. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.²⁸

c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).

²⁸ Sukrama, dkk, *Bela Negara Peningkatan Kualitas Pengamalan Wawasan Kebangsaan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II)*, Purna Bhakti Negara, 1996, hlm. 29.



Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain:

- a. **Devaluasi** yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
- b. **Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon)** untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.
- c. **Devaluasi** yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.



3. Orde Baru

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Ini merupakan praktik dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia.

4. Orde Reformasi

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan



manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

- a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis



dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni



Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya *Indonesian Infrastructure Summit* pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.²⁹

Sejarah Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

- 1) 1950-1959: *sistem ekonomi liberal (masa demokrasi liberal)*
- 2) 1959-1966: *sistem Ekonomi Etatisme(masa demokrasi terpimpin)*
- 3) 1966-1998: *sistem Ekonomi Pancasila (Demokrasi Ekonomi)*
- 4) 1998-sekarang: *sistem Ekonomi Pancasila (demokrasi Ekonomi) yang dalam praktiknya cenderung Kapitalis.*

²⁹ Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 19.



D. DASAR KONSTITUSIONAL

Falsafah ekonomi Pancasila dalam falsafah sosial Pancasila memberi pendekatan institusional dalam wawasan ekonomi makro, mempunyai ketentuan-ketentuan konstitusional sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1 UUD 45).
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (pasal 33 ayat 2 UUD 45).
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (pasal 33 ayat 3 UUD 45).
4. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara (pasal 34 UUD 45). Contohnya: GNOT< JPS. Bea siswa, dll.
5. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 UUD 45).



Kalau dilihat dari isi pasal 33 terkandung makna demokrasi “ekonomi”, dimana demokrasi ekonomi merupakan suatu bentuk perekonomian yang seimbang antara peranan pemerintah dan swasta, tidak ada pemusatan ekonomi pada satu kelompok saja yang akan menimbulkan *oligopoly* dan monopoli serta cabang produksi yang penting masyarakat dikuasai oleh Negara untuk mencegah terjadinya *oligopoly* dan monopoli tersebut.

Ciri-ciri demokrasi ekonomi antara lain tertuang dalam UUD 45 pasal: 33, 34, dan 27. *Demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut:*

1. Sistem *free fight liberalism*

Dimana kebebasan berada ditangani swasta hal ini dapat menimbulkan terjadinya *oligopoly* dan *monopoly*.

2. Sistem *etatisme* (pemusatan kekuatan pada Negara) dimana Negara bersifat aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara.



E. DASAR OPERASIONAL SISTEM EKONOMI PANCASILA

Dasar operasional sistem ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Peranan Negara dan swasta.

Peranan Negara aparaturnya ekonomi adalah penting tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme (serba Negara). Peranan swasta adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar dicegah pula timbulnya *free fight liberalism*. Dalam sistem ekonomi Pancasila, usaha Negara dan swasta tumbuh berdampingan dengan seimbang tanpa dominasi berlebihan satu terhadap yang lain.

b. Tidak ada dominasi (kelompok berkuasa/memiliki pengaruh karena sesuatu hal).

Dalam sistem ekonomi Pancasila, hubungan kerja antara lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal, seperti halnya pada ekonomi kapitalis. Juga tidak didasarkan pada dominasi buruh, seperti halnya dalam ekonomi komunis, tetapi asas kekeluargaan antar manusia jadi peranan manusia tidak ditentukan pada besar kecilnya modal yang dimiliki, atau tinggi rendahnya upah yang diterima. Peranan manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia yang berkualitas.



c. Masyarakat memegang peranan sentral.

Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral dalam sistem ekonomi Pancasila. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Masyarakat adalah bagian dari unsur ekonomi non Negara, yakni swasta. Sebagai contoh masyarakat petani, masyarakat nelayan, masyarakat buruh, dsb. Maka yang penting dalam perkembangan sub-sistem masyarakat ini adalah terbentuknya kesempatan memperoleh sumber daya alam bagi kelompok masyarakat menurut:

- 1) Macam sumber daya alam seperti tanah untuk petani, laut untuk nelayan, sumber mineral untuk buruh, dsb.
- 2) Sumber kecilnya sumber daya alam yang bisa dikelola;
- 3) Sifat penguasa atas sumber daya seperti permanen (pemilikan) atau sementara (pinjam, sewa dll)

d. Pengaturan, perencanaan dan pengawasan.

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan hak menguasai ini, perlu dijaga supaya sistem yang berkembang tidak menuju



pada etatisme (penguasaan negara), oleh karena itu, hak menguasai oleh Negara harus dilihat dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban Negara sebagai pengatur, perencana dan pengawas segala sumber daya alam yang ada yang menguasai hajat hidup orang banyak yang ke semuanya itu diatur, direncanakan, dan diawas untuk kepentingan seluruh masyarakat.

e. Tidak bebas nilai.


Sistem ekonomi Pancasila tidak bebas nilai. Bahkan sistem nilai (*value system*) dimana nilai-nilai yang dikaji dalam ekonomi Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa membuahkan sistem ekonomi yang mengimbangi ikhtiar duniawi dengan ikhtiar untuk akhirat. Etika agama turut mempengaruhi sistem nilai dan pertimbangan ekonomi, serta usaha yang dilakukan tidak melanggar kaidah-kaidah agama (halal dan haram).
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber kepada penentangan terhadap praktik dan ajaran kapitalisme dan komunisme (yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan), dan memberi tekanan lebih besar pada nuansa manusiawi menggalang ekonomi dalam perkembangan masyarakat.



- 3) Persatuan Indonesia menghasilkan sikap membuka kesempatan ekonomi secara adil bagi semua, terlepas dari kedudukan suku, agama, ras, atau daerah. Sebagai warga Negara Republic Indonesia semua kita adalah sama di depan hukum dan berhak melakukan kegiatan ekonomi yang tidak melanggar UU dan Pancasila.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dalam sistem perekonomian Pancasila pelaksanaannya dilakukan dengan demokrasi baik itu demokrasi ekonomi maupun demokrasi politik.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan harus selalu memperhatikan pemerataan sosial.



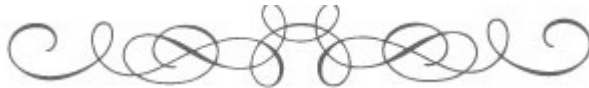


BAB IV
BANGUN USAHA EKONOMI
NEGARA, SWASTA, DAN
KOPERASI



BAB IV

BANGUN USAHA EKONOMI NEGARA, SWASTA, DAN KOPERASI



Sejak awal kemerdekaan Indonesia ada setidaknya tiga pelaku ekonomi nasional dalam perekonomian Indonesia yaitu:

- Badan usaha milik Negara (BUMN)
- Badan usaha milik swasta (BUMS)
- Perkumpulan koperasi.

Dari ketiga bangun tersebut yang ingin dijadikan dasar pengaturan perekonomian nasional adalah : *Koperasi yaitu ;*



Bangun ekonomi usaha bersama yang diatur berdasarkan asas kekeluargaan.

Dari ketiga pelaku ekonomi nasional tersebut masing-masing memiliki etika dalam melaksanakan tugasnya di perekonomian nasional yaitu :

1. Sektor koperasi merupakan sektor swadaya dan merupakan perkumpulan orang untuk meningkatkan pemerataan dan mewujudkan keadilan sosial.
2. Sektor usaha swasta merupakan sektor usaha pemupukan modal masyarakat untuk meningkatkan pemerataan dan mewujudkan keadilan sosial.
3. Sektor usaha Negara merupakan sektor perlindungan dan kebutuhan masyarakat banyak.

Berikut ini akan diuraikan bangun-bangun usaha dalam masing-masing sektor tersebut

A. SEKTOR KOPERASI

1. Pengertian koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin yang berarti bekerja bersama-sama (dengan orang lain).³⁰

Koperasi dari dua kata :

COO = Dengan

³⁰ Abdul Basith, S.pd., M.Si, Islam dan Manajemen Koperasi, UIN MALANG PRESS: Cetakan 1 2008, hal 42



Operasi = Bekerja

Dalam istilah ekonomi koperasi berarti “organisasi ekonomi dengan anggota suka rela”.³¹Jadi dapat diperoleh pengertian singkat tentang koperasi yaitu ;

- a. Keanggotaan suka rela maksudnya; anggota bebas masuk dan keluar organisasi sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. Keanggotaan dapat dari kalangan produsen atau konsumen dan juga perseorangan atau kelompok.
- c. Tujuan organisasi ekonomi adalah ; meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- d. Usaha dilaksanakan dengan kerja sama kekeluargaan termasuk dalam memperoleh keuntungan dibagikan kepada seluruh anggota sesuai dengan jasa yang telah diberikan.

2. Landasan Koperasi Indonesia

Landasan koperasi (pasal 2 UU No.12 Th 1967) yaitu :

- a. Landasan idiil koperasi Indonesia : Pancasila.
- b. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah : UUD serta penjelasannya.

³¹ R.T. Sutantya Rahardja Hardhikusuma, S.H., M.H., Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005,hal 14



- c. Landasan mental koperasi Indonesia : setia kawan dan kesadaran pribadi.

3. Fungsi Koperasi

Pada pasal 4 UU No.12 Th 1967 memperinci fungsi koperasi sbb :

- a. Alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.
- c. Alat Pembina masyarakat untuk memperkuat kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

4. Asas-asas Koperasi

- ✓ Kekeluargaan

Para anggota koperasi secara suka rela tanpa paksaan menjadi anggota koperasi serta berani berkorban untuk kepentingan bersama layaknya suatu keluarga.

- ✓ Gotong royong

Disini maksudnya: seluruh kegiatan koperasi dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan pribadi serta hasil kerjanya tersebut dibagi



berdasarkan atas jasa yang telah disumbangkan kepada koperasi berdasarkan atas modal.

5. Sendi-sendi Dasar Koperasi

Sendi-sendi dasar koperasi Indonesia merupakan :

- a. Dasar kerja koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial.
- b. Ciri khas dari koperasi Indonesia dan membedakan koperasi dari bangun-bangun koperasi lainnya.

Sendi-sendi dasar koperasi Indonesia diantaranya adalah:

- a. Sifat keanggotaannya suka rela dan terbuka untuk tiap WNI artinya ; suka rela dan terbuka.
- b. Bahwa setiap orang yang mau menjadi anggota koperasi harus berdasarkan kesadaran keyakinan serta tekad untuk bekerja sama secara aktif dalam koperasi untuk meningkatkan taraf hidup bersama.
- c. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi ini merupakan cerminan sikap demokrasi dalam koperasi.
- d. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, jadi SHU dibagi tidak berdasarkan modal yang dimasukkan dalam



koperasi tapi berdasarkan pertimbangan jasa atau usaha serta kegiatannya untuk memajukan koperasi.

- e. Adanya batasan bunga dalam modal. Walaupun modal merupakan faktor produksi yang dipergunakan untuk kesejahteraan anggota dan bukan untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya karena modal dalam koperasi diberikan bunga terbatas sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- f. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya ini merupakan watak sosial koperasi walaupun koperasi dibina oleh anggota dan watak anggota tapi koperasi tetap ikut membangun masyarakat pada umumnya.
- g. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka semua keputusan ditentukan secara bersama melalui musyawarah dalam rapat anggota.
- h. Swadaya, swakarsa dan swasembada merupakan cerminan dari prinsip koperasi, percaya kepada diri sendiri (percaya diri) mampu untuk membangun diri sendiri.



6. Aplikasi Fungsi Koperasi

Dalam menjalankan fungsinya, koperasi berdasar pada pembentukan sistem ekonomi Pancasila, maka koperasi perlu dibangun menjadi 5 wahana pokok :

a. Wahana ekonomi

Menjadi alat untuk memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya antara lain :

- ✓ Alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- ✓ Alat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- ✓ Alat perjuangan untuk menghilangkan ketidaksempurnaan pasar seperti monopoli, oligopoly, dsb.

b. Sebagai wahana pendidikan :

Dengan koperasi dapat tingkatkan sumber daya manusia seperti kita ketahui bahwa koperasi itu tidak tergantung pada pemerintah, disini pemerintah hanya bertindak sebagai pelindung jadi secara tidak langsung koperasi disini mendidik manusia-manusia Indonesia untuk menjadi lebih mandiri.



- c. Wahana pengimbang antara aparatur ekonomi Negara dan ekonomi swasta.

Karena posisi koperasi disini berada ditengah-tengah antara Negara dan swasta maka diusahakan kebijakan ekonomi Negara tidak mengganggu tumbuh kembang koperasi begitu pula fasilitas pengembangan dunia swasta perlu pula memperhitungkan faktor-faktor kendala yang tidak menghambat perkembangan koperasi.

- d. Wahana pengkajian ideologi Pancasila.

Koperasi harus tumbuh dan berkembang sebagai organisasi sosial yang membuat nilai-nilai Pancasila.

7. Pengembangan koperasi

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial, adalah merupakan organisasi atau perkumpulan orang (bukan perkumpulan modal), yang dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Sistem ekonomi Indonesia bukanlah sistem ekonomi yang serba Negara atau etatisme tapi



merupakan sistem ekonomi yang memberi peluang pada bekerjanya *mekanisme pasar*.

Oleh karena itu bangun usaha yang diinginkan oleh UUD 1945 yaitu koperasi haruslah pula berorientasi dalam sistem pasar tersebut.

B. SEKTOR USAHA SWASTA

1. Manajemen Berasas Kekeluargaan

Sebelumnya kita ketahui hal-hal dalam usaha swasta :

- a. *Etika ekonomi* perusahaan-perusahaan swasta adalah penyediaan barang-barang dan jasa bagi masyarakat untuk mengambil keuntungan dari usahanya.
- b. Usaha swasta mendapat kesempatan luas dalam sistem pasar yang kita anut, mempunyai fungsi ekonomi menjadi wadah pemupukan modal masyarakat di luar usaha Negara.
- c. Usaha swasta mempunyai motivasi mengejar keuntungan sebesar-besarnya karena pemupukan modal hanya dicapai melalui perolehan keuntungan yang cukup besar dari waktu ke waktu sehingga perluasan perusahaan dapat dilakukan.



Kata *kekeluargaan* bukanlah berarti sistem koneksi, kolusi dan sebagainya, dan bukan pula berarti tidak diperbolehkan adanya persaingan. Persaingan tidak dilarang namun tidak diinginkan persaingan yang bersifat mematikan usaha orang lain apalagi persaingan yang tidak jujur.

2. Sektor Formal dan Informal

Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dibagi atas :

a. ***Sektor formal*** yaitu ;

Kegiatan ekonomi yang tunduk pada pengawasan dan pengaturan pemerintah serta pelaksanaannya menggunakan manajemen bisnis.

Contohnya : CV, PT, dan sebagainya.

b. ***Sektor informal*** yaitu ;

Sebagian besar ekonomi masyarakat lain merupakan kegiatan ekonomi informal, baik disektor swasta maupun disektor koperasi.

Ciri-cirinya :

- a. Bergerak dibidang perdagangan atau penawaran barang- barang dan jasa yang bersifat kecil-kecilan.
- b. Kurang atau tidak memerlukan investasi besar atau modal yang besar karena memang tidak mempunyai modal yang cukup bahkan kadang-kadang hanya bermodalkan tenaga.



- c. Kebanyakan hasilnya hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, jadi tidak dapat diharapkan untuk mengakumulasi modal.
- d. Lapangan kerja diciptakan sendiri atau wirausaha, atau pra pengusaha kecil.
- e. Pada umumnya kurang atau tidak menggunakan manajemen bisnis, profesional misalnya berhubungan dengan lembaga keuangan dan produktivitas kerja.
 - i. *Contohnya* : pedagang kaki lima, pedagang bakso, pedagang rokok, pedagang sayur, tukang becak, dsb.

Peranan sektor informal amat penting dalam perekonomian yaitu; sebagai mata pencarian dan sumber pendapatan serta penyerapan tenaga kerja. Dalam sektor informal dibutuhkan peningkatan yang efisiensi terutama dalam hal penggunaan waktu dan produktivitas kerja, sehingga pendapatan atau penghasilan mereka dapat lebih baik.

Berhubungan dengan sifat sektor informal yang kurang dapat mendapatkan pengawasan dan pengaturan dari pemerintah karena tidak berbadan hukum dan kondisi sektor informal yang hanya berupa swadaya masyarakat atau perorangan maka



banyak kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi yang hanya memberikan dampak pada sektor formal atau bahkan kadang-kadang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan sektor-sektor informal.

Bantuan modal seperti kredit modal kerja dan modal usaha amat dibutuhkan oleh sektor informal untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Jelaslah diperlukan perlindungan khusus guna pengembangan sektor informal ini oleh pemerintah. Selanjutnya dibutuhkan iklim penunjang usaha untuk mengembangkan sektor informal ini.

3. Iklim Penunjang Usaha

Permasalahan pokok yang sering dihadapi adalah; bagaimana pengaruh hubungan badan-badan usaha swasta (swasta besar dan menengah) dengan koperasi dan sektor informal agar dapat berjalan berdampingan secara serasi dan seimbang. Untuk itu perlu diamati perilaku dan interaksi yang dapat menciptakan iklim usaha yang ideal, perilaku dan interaksi yang diinginkan adalah :

- a. Prinsip efisiensi.
- b. Kerja sama yang saling menguntungkan.
- c. Kesempatan ekonomi yang jelas.



Tindakan efisiensi secara teknis harus tidak ada batasnya, selama masih mungkin efisiensi harus ditingkatkan. Barang yang berkualitas tinggi dapat dijual dengan harga yang lebih murah hal tersebut dapat dilakukan karena biaya produksi lebih murah atau dengan kata lain produksi dilakukan secara efisien.

Contoh ; salah satu sebab kalahnya pengusaha lemah dibandingkan pengusaha kuat karena pengusaha lemah belum dapat menyejajarkan efisiensinya dengan pengusaha kuat.

Oleh karena itu interaksi yang ideal adalah ; kerja sama yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Akan tetapi upaya untuk menciptakan perilaku yang ideal tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbatasan yang dapat menghambat iklim yang ideal tersebut.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain :

- a. Tidak seimbangya kekuatan antara pengusaha kuat dan pengusaha lemah (termasuk koperasi) dibidang manajemen, permodalan, dan pemasaran.
- b. Birokrasi yang berlebihan pada pengusaha lemah terutama koperasi yang berakibat lambannya dalam mengambil keputusan dan efisiensi.



Jadi langkah yang penting harus dilakukan untuk pengusaha lemah yaitu ; pembenahan efisiensi internal sehingga pengusaha lemah dapat meningkatkan daya saing yang sehat serta dapat hidup berdampingan dan kerja sama yang ideal dengan pengusaha kuat.

4. Kerja Sama yang Saling Menguntungkan

Kerja sama itu dapat dilakukan misalnya dengan sistem “Bapak angkat” yang akan lebih memperlancar proses transfer pengetahuan dan teknologi. Harapan pengusaha lemah dalam transfer pengetahuan dan teknologi, adalah :

- a. Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kualitas terbaik untuk memajukan usahanya.
- b. Tenaga tersebut dapat lebih berani menghadapi permasalahan, mampu memecahkannya, mampu mengambil keputusan yang tepat, serta siap menanggung risiko.

Kerja sama pengusaha kuat dan pengusaha lemah dapat berbentuk :

- a. Pembagian kerja, yaitu kerja sama antara pihak-pihak yang kegiatan usahanya berbeda tetapi saling melengkapi.



- b. Saling menyambung (linkage), yaitu kerja sama antara pihak-pihak yang kegiatan usahanya yang merupakan mata rantai yang berurutan ke muka dan berkembang.
- c. Berdasarkan prinsip patungan, yaitu kerja sama antara pengusaha kuat dan pengusaha lemah (koperasi) dengan membentuk perusahaan baru.

Pengembangan pasar dalam negeri perlu dilakukan oleh pengusaha kuat dengan menggunakan barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Hal ini berarti memperluas pangsa pasar bagi produksi pengusaha lemah terutama koperasi di pedesaan, yang selama ini pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh koperasi dan pengusaha kecil masih menjadi masalah.

5. Iklim Berusaha yang Memadai.

Iklim berusaha yang bersifat umum, adalah :

- a. Stabilitas ekonomi dan politik yang mantap.
- b. Kesungguhan dan kejujuran aparaturnya pemerintah di dalam membina, mengarahkan, serta membimbing pengembangan dunia usaha.



- c. Tersedianya dana, prasarana ekonomi dan sosial yang memadai, seperti jalan, telekomunikasi, pelabuhan, angkutan, pendidikan, dll.

Iklm usaha yang bersifat khusus antara lain :

- a. Bidang-bidang apa dan dimana yang masih terbuka untuk investasi.
- b. Kelancaran berbagai macam kerajinan dan kepastian hukum dalam usaha.

Bila iklim-iklim usaha tersedia dengan memadai berarti pula akan dapat pengusaha lemah termasuk koperasi mengembangkan usahanya. Faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja dll, tersedia dalam jumlah dan mutu yang memadai. Tersedianya faktor-faktor produksi tidak hanya mendorong pengusaha kuat untuk berkembang, tetapi juga menjadi pendorong untuk berkembangnya usaha koperasi dan usaha lainnya.

C. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN).

1. Jenis-jenis BUMN

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan



nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.³²

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN.

Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah:

a. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan Persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

³² Andriani Nurdin, Kepailitan BUMN Persero berdasarkan Asas Kepastian Hukum, (Bandung: PT Alumni, 2012), hal. 1.



Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:

- 1) Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
- 2) Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan
- 3) Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
- 4) Modalnya berbentuk saham
- 5) sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
- 6) Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
- 7) Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
- 8) Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi
- 9) perusahaan Dipimpin oleh direksi
- 10) Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
- 11) Tidak mendapat fasilitas Negara
- 12) Tujuan utama memperoleh keuntungan
- 13) Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
- 14) Pegawainya berstatus pegawai Negeri



Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS. Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah.³³

Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan), PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. Garuda Indonesia Airways (GIA).

³³ Cita Yustisia, dkk, Restrukturisasi Perusahaan – dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal. 266-267.



b. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah
- 3) Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan
- 4) Status karyawannya adalah pegawai negeri

Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS AB Harahap Kita Perjan RS Sanglah Perjan RS Kariadi Perjan RS M. Djamil Perjan RS Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Sardjito Perjan RS M. Husein Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Persahabatan

Perusahaan jawatan kereta api(PJKA), bernaung di bawah Departemen Perhubungan. Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA)



berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA), dan yang terakhir berubah nama menjadi PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI).

Perusahaan Jawatan Pegadaian bernaung di bawah Departemen Keuangan. Pada saat ini, Perusahaan Jawatan Penggadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.

c. **Perusahaan Umum (Perum)**

Perusahaan Umum (PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan.

Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):

- 1) Melayani kepentingan masyarakat umum.
- 2) Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.
- 3) Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya, perusahaan umum (PERUM) bebas -membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
- 4) Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
- 5) Pkerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.
- 6) Mencari keuntungan untuk mengisi kas negara.



Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka.

d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
- b. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan
- c. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
- d. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang
- e. Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan
- f. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat
- g. Sebagai sumber pemasukan Negara
- h. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik Negara
- i. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public
- j. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank



- k. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan.

Tujuan Pendirian BUMD:

- a. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas Negara
- b. Mengejar dan mencari keuntungan
- c. Pemenuhan hajat hidup orang banyak
- d. Perintis kegiatan-kegiatan usaha
- e. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah

2. Peranan Badan Usaha Milik Negara dalam Pembangunan.

Dalam sejarah perkembangan ekonomi Indonesia BUMN memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. BUMN mempunyai aset yang tidak kecil dan bidang usaha yang luas mencakup berbagai sektor ekonomi termasuk sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Oleh karena itu masalah pembiayaan pembangunan tidak dapat dilepas dari masalah peningkatan kemampuan BUMN sebagai sumber dana pembangunan baik untuk membiayai investasinya sendiri maupun investasi pemerintah melalui APBN



Kunci dari peranan BUMN dalam pendanaan pembangunan adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan BUMN. Langkah-langkah yang diperlukan untuk ini mencakup pemberian otonomi yang semakin besar dalam pengelolaan BUMN seiring dengan penyempurnaan sistem dan prosedurnya. Dan juga harus diciptakan suasana persaingan yang sehat bagi BUMN agar terdorong untuk makin meningkatkan efisiensi dan inovasinya.





BAB V

***STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
INDUSTRI PERTANIAN DASAR***



BAB V

STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

INDUSTRI PERTANIAN DASAR



A. PROSES TRANSFORMASI STRUKTURAL

1. Struktur Ekonomi Indonesia

Struktur ekonomi digunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas, dalam struktur tersebut menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.



Sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencarian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Dikenal dua macam struktur ekonomi yaitu :

- ✓ Struktur agraris adalah struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencarian sebagian besar penduduknya. Pada umumnya Negara-negara berkembang termasuk Indonesia disebut Negara agraris. Dan untuk Negara-negara yang belum, termasuk Negara berkembang yang pertaniannya sangat tradisional dikategorikan Negara agraris tradisional (India).
- ✓ Industri, dimana struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Jepang dan Kanada termasuk Negara industri maju sedangkan Negara-negara Eropa dan Negara-negara lainnya termasuk Negara industri.

2. Pembangunan Pertanian

Pada masa awal kemerdekaan Negara-negara sedang berkembang pada umumnya tertarik pada gagasan industrialisasi karena industrialisasi



diwujudkan dengan pembangunan industri-industri besar dan modern. Keadaan tersebut merupakan simbol dari kemajuan dan pembangunan.

Selain itu industrialisasi dianggap sebagai kunci yang dapat membawa masyarakat ke arah kemakmuran, atau sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi diharapkan dapat mengatasi masalah kesempatan kerja yang kurang menarik di sektor pertanian.

Dibandingkan sektor pertanian sektor industri dianggap lebih mendesak dan perlu dikembangkan, karena:

- ✓ Penanaman modal di sektor pertanian kurang menarik karena tambahan imbalannya dianggap kurang memadai.
- ✓ Pertumbuhan sektor pertanian lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan di sektor industri.

Indonesia pun beranggapan demikian, akan tetapi perlu diketahui bahwa mendapatkan industri yang kuat harus didukung oleh pertanian yang tangguh. Hal ini berarti bahwa harus terlebih dahulu dilakukan pembangunan pertanian menuju ke arah



tercapainya sektor pertanian yang maju, efisiensi dan tangguh.

Beberapa alasan perlunya pembangunan pertanian yang tangguh antara lain:

- a. Untuk memasarkan produk dari pabrik-pabrik diperlukan kemampuan daya beli masyarakat. Karena kita ketahui bahwa masyarakat merupakan potensi pasar adalah masyarakat petani yang rata-rata mempunyai kemampuan daya beli yang terbatas. Karenanya diperlukan pembangunan pertanian agar pendapatan petani dapat ditingkatkan.
- b. Agar industri dapat melaksanakan efisiensi, diperlukan biaya dari faktor-faktor produksi yang dapat ditekan serendah mungkin. Upah dan gaji tenaga kerja dapat ditekan sedemikian rupa, bila upah dan gaji itu dapat memenuhi kebutuhan akan pangan. Dengan pembangunan pertanian, dapat dilakukan peningkatan produksi pangan dengan harga yang dapat dijangkau oleh tenaga kerja.
- c. Dengan pembangunan pertanian dan terciptanya sektor pertanian yang maju, maka dapat dilakukan keterkaitan dan keterpaduan usaha antara sektor pertanian dan sektor industri. Kebutuhan akan



peralatan dan pengolahan hasil dari sektor-sektor pertanian tanaman pangan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perkebunan dapat dibangun industri pengolahan alat-alat pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian , industri-industri tersebut merupakan industri pertanian dasar.

- d. Sektor pertanian yang terdiri dari sektor pertanian tanaman pangan kehutanan, perikanan, peternakan dan perkebunan dapat menyediakan faktor-faktor produksi yang menjadi bahan mentah yang dibutuhkan oleh industri-industri pertanian lanjutan, secara berkesinambungan dengan harga yang stabil, sehingga sektor industri dapat menjadi kuat karena didukung oleh sektor pertanian yang maju dan tangguh.
- e. Dengan pembangunan di sektor industri maka akan terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Karena sektor pertanian telah menggunakan alat dengan teknologi modern sehingga tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin. Dan tenaga kerja manusia bergeser ke sektor industri ini berarti tambahan tenaga kerja bagi sektor industri sehingga industri dapat memproduksi dengan upah dan gaji yang relatif murah namun dalam batas kewajaran, dan ini



berarti industri dapat melaksanakan efisiensi biaya yaitu memberikan upah dan gaji dalam batas wajar.

Kedudukan sektor pertanian yang relatif kurang penting sejalan dengan perkembangan ekonomi. Namun sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan dan bahan mentah bagi industri. Di Negara-negara maju komoditi-komoditi pertanian yang telah diolah menjadi produk industri, tidak saja terbatas bagi kebutuhan pasar dalam negeri tetapi terus berkembang menjadi komoditi ekspor.

Bagi Indonesia sektor pertanian masih tetap penting sekalipun pilihan mengharuskan jatuh pada sektor industri sebagai mesin pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang sangat ketat dalam perdagangan Internasional, mengharuskan komoditi pertanian diolah terlebih dahulu dalam sektor industri sebelum di ekspor.

Untuk itu perlu dikaji bagaimana Negara-negara maju menggunakan teknologi pertanian untuk meningkatkan efisiensi dalam produktivitas sektor pertanian mereka.

Namun masalahnya dapatkah proses transformasi yang telah terjadi di Negara-negara maju itu diterapkan di Negara kita. Dalam hal ini harus



dilihat keadaan yang bersifat mendasar antara kondisi Negara-negara maju tersebut dengan kondisi yang terdapat di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia :

- ✓ Di Negara-negara maju, sektor industri dulu yang maju baru sektor pertanian. Sebagai bukti: penjajah yang datang ke Indonesia pertama tujuannya untuk mencari bahan baku guna menunjang kelancaran sektor industrinya.
- ✓ Di Indonesia terutama di pulau Bali dan Jawa yang padat penduduknya tersedia lahan pertanian sangat terbatas bahkan semakin berkurang karena pertumbuhan pemukiman dan perkembangan industri. Jalan keluar semua itu yaitu dilakukan pemindahan petani dari pulau Jawa dan Bali melalui program Transmigrasi, di samping untuk pemerataan penyebaran penduduk, juga dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan pertanian di luar pulau Jawa dan Bali.

Perbedaan pertanian di Pulau Jawa dan Bali dengan pertanian di luar pulau Jawa dan Bali adalah:

Di pulau Jawa dan Bali, pertanian tanaman pangan dapat dikatakan sudah maju. Disini lahan pertanian adalah:

- ✓ sawah yang memiliki irigasi



- ✓ dari pengolahan tanah sampai panen petani dapat menggunakan teknologi pertanian
- ✓ pupuk dan pestisida cukup tersedia
- ✓ modal dapat diperoleh dengan mudah
- ✓ panen dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun
- ✓ biasanya tanaman padi diselingi dengan palawija
- ✓ untuk pemasaran hasil pertanian tidak mengalami masalah karena sarana dan prasarana transportasi dan pemasaran sudah tersedia.

Di pulau Jawa dan Bali pertanian tanaman pangan dilakukan dengan berladang. Kadang-kadang harus berpindah-pindah.

- ✓ Untuk berladang kadang harus membuka hutan terlebih dahulu.
- ✓ Peladang jarang atau hampir tidak pernah menggunakan pupuk dan pestisida.
- ✓ Modal tidak terpikirkan dari mana, panen hanya sekali dalam setahun.
- ✓ Hasil berladang rata-rata tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
- ✓ Belum terpikirkan pemasaran dari hasil pertanian pangan karena hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- ✓ Tidak ada transportasi yang memadai untuk memasarkan barang.



Pada kenyataannya penerapan dari teknologi pertanian mengharuskan para petani untuk membeli bibit unggul, pestisida dan pupuk maka itu secara tidak langsung memerlukan modal, oleh karena itulah peranan lembaga perkreditan / lembaga perbankan (seperti BUUD) dan koperasi (KUD) dalam memberikan kredit menjadi sangat penting dalam pembangunan pertanian.

B. INDUSTRI PERTANIAN DASAR

1. Strategi Pembangunan Pedesaan

Pada dasarnya semua strategi pembangunan mengarah kepada perubahan struktural. Sejarah perekonomian menunjukkan dalam pembangunan suatu Negara telah terjadi pergeseran struktur ekonomi dari agraris menjadi industri modern.

Perubahan struktur ini tampak dalam bentuk.

- a. Hubungan terhadap produk nasional semakin menurun sedangkan sumbangan sektor industri terhadap produksi nasional harus meningkat.
- b. Sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sumbangan sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja semakin rendah dan sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja dari sektor industri semakin meningkat.



- c. Perubahan struktur yang berikutnya yaitu pada proses produksi. Dimana sektor pertanian dalam proses produksi telah memanfaatkan teknologi dan keterampilan-keterampilan baru.

Ada tiga bentuk strategi pembangunan yang dapat dipraktikkan di pedesaan yaitu :

- a. Strategi pembangunan yang disebut **teknokratik** dengan sasaran utamanya peningkatan produksi. Dalam strategi ini yang menonjol adalah sistem usaha tani swasta besar, perusahaan perkebunan yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari pemerintah baik itu berupa modal maupun peralatan yang ke semuanya itu untuk peningkatan produksi sehingga dapat membantu pembangunan di desa sekitarnya.
- b. Strategi pembangunan **Radikal** , dimana tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi tetapi yang lebih luas lagi yaitu : perubahan sosial yang mendasar seperti : menata ulang aparat desa, penyediaan fasilitas desa (puskesmas, sekolah, dll)
- c. Strategi pembangunan **Reformasi**, berada diantara kedua strategi di atas dimana sasaran yang akan dicapai bukan hanya peningkatan produksi melainkan juga pemerataan pendapatan masyarakat, mungkin juga kekayaan masyarakat.



2. Pembangunan Ekonomi : Industri Skala Besar.

Pembangunan ekonomi dengan menitik beratkan pada industri skala besar adalah upaya untuk membawa masyarakat miskin pada kemakmuran yaitu dengan penyerapan tenaga kerja dan dapat menumbuhkan industri-industri kecil yang baru di pedesaan.

3. Industri Pertanian Dasar

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, pemerintah menganjurkan agar petani menggunakan teknologi modern, baik dalam proses penanaman maupun dalam proses pengolahan hasil pertanian.

Secara keseluruhan kebijaksanaan tersebut dapat menghemat tenaga kerja akan tetapi dapat menimbulkan pengangguran yang menyebabkan turunnya pendapatan di sebagian penduduk pedesaan kalau hal ini terjadi merupakan suatu hambatan terjadinya proses industrialisasi. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas ada berbagai kebijaksanaan yang dapat ditempuh, antara lain :

- ✓ Penganekaragaman (diversifikasi) hasil pertanian dengan memanfaatkan tanah air dan teknologi baru. Dan hal ini akan meningkatkan penghasilan petani bahkan juga menyediakan lapangan kerja baru. Hasil



pertanian ini dapat diolah dalam industri kecil dan dapat dijual di pasaran dalam negeri, contoh : tanah sebaiknya tidak hanya ditanami singkong saja (yang mana singkong tersebut akan disetor ke industri besar) tapi sebaliknya dianekaragamkan dengan cara tumpang sari atau tersendiri misalnya saja tanaman jeruk, sayuran, cabai, dsb.

- ✓ Menciptakan industri pengolahan di pedesaan, baik dalam satuan kecil dan rumah tangga atau dalam pabrik besar. Dengan cara ini sebagian tenaga kerja yang menganggur dapat ditampung. Selain itu industri ini tidak hanya mengolah hasil pertanian saja akan tetapi juga dapat memproduksi barang-barang yang menjadi faktor produksi pertanian seperti; alat-alat pertanian, pupuk, dsb.

Selanjutnya peranan pedagang masih sangat penting dalam memasarkan hasil pertanian dan juga harus ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan juga adanya pasar.





BAB VI
KEBIJAKSANAAN EKONOMI



BAB VI

KEBIJAKSANAAN EKONOMI



A. KEBIJAKSANAAN SEKTORAL

1. Kebijakan Pembangunan Sektoral

Ruang lingkup kebijakan pembangunan sektoral meliputi kebijakan-kebijaksanaan pembangunan dalam:

- a. Bidang Ekonomi, yang terdiri dari sektor atau bidang: Industri, pertanian, pengairan, pangan dan perbaikan gizi, tenaga kerja, perdagangan, transportasi, pertambangan, kehutanan, usaha nasional, pariwisata, pos dan komunikasi, koperasi,



pembangunan daerah, kelautan, kedirgantaraan, keuangan, transmigrasi, energi dan lingkungan hidup.

- b. Bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan yang terdiri sektor atau bidang: Kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kependudukan, keluarga sejahtera, anak dan remaja, pemuda, peranan wanita, perumahan dan pemukiman, olah raga.
- c. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
- d. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Bidang hukum
- f. Bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa yang terdiri dari sektor atau bidang politik: Dalam negeri, hubungan luar negeri, aparatur negara, sistem informasi dan statistik.
- g. Bidang pertahanan keamanan

Kebijaksanaan pembangunan sektoral yang dimasukkan ke dalam pembahasan perekonomian Indonesia, adalah kebijaksanaan sektoral di bidang ekonomi. Kebijakan di bidang-bidang lainnya



akan lebih tepat dibicarakan dalam pembahasan yang menyangkut kebijaksanaan pembangunan sektoral.

2. Kebijakan Sektoral Bidang Ekonomi

a. Sektor Industri

Sarana pembangunan industri adalah terwujudnya sektor industri yang kuat dan maju, sehingga mampu menunjang terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal. Wujud industri yang kuat dan maju memiliki ciri, antara lain :

- 1) Industri yang berdaya saing tinggi yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas dan kemampuan penggunaan teknologi canggih.
- 2) Struktur industri yang kukuh dan seimbang dengan keterkaitan yang erat baik antar industri maupun antar sektor industri dan sektor lainnya, sehingga mempunyai daya tahan tinggi terhadap perubahan.
- 3) Industri yang makin terbesar keseluruhan tanah air dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan posisi geografis Indonesia secara serasi sehingga mampu memacu pertumbuhan



ekonomi daerah dan meningkatkan akses ke pasar dunia.

- 4) Industri kecil dan menengah yang berkembang semakin andai sebagai tulang punggung pembangunan industri, terutama industri kecil dan menengah sebagai pemasok dan penopang industri yang berwawasan lingkungan.
- 5) Prasarana fisik dan kelembagaan andal dan mendukung kelangsungan proses inovasi serta pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Kebijaksanaan di sektor industri, pada dasarnya bertumpu pada strategi, yaitu:

- 1) Perkembangan industri yang berwawasan luas dan bertumpu pada pasar internasional, yang meliputi:
 - ✓ Industri padat sumber daya alam, dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju.
 - ✓ Industri padat karya, yang makin padat keterampilan.
 - ✓ Industri padat teknologi.
- 2) Pembangunan industri dengan mempercepat penguasaan teknologi dalam rangka



memantapkan dasar industrialisasi untuk menghasilkan produk industri unggulan.

- 3) Pembangunan industri yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan dunia usaha sebagai pameran utamanya.
- 4) Pembangunan industri yang mengutamakan tercapainya pertumbuhan bersama dengan pemerataan serta memberikan prioritas pada berbagai industri yang mampu tumbuh dengan cepat dan meningkatkan peran serta masyarakat secara luas dan produktif.

b. Sektor Pertanian

Sasaran utama pembangunan pertanian adalah terciptanya sektor pertanian yang maju, efisien dan tangguh di cerminkan oleh:

- 1) Meningkatkan peranan sektor pertanian dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- 2) Terpenuhinya kebutuhan rakyat akan pangan.
- 3) Meningkatkan daya beli rakyat.
- 4) Meningkatkan kemampuan penyediaan bahan mentah untuk pengembangan industri.



- 5) Meningkatkan penguasaan iptek dan berkembangnya kelembagaannya pertanian yang tangguh.
- 6) Makin terkait dan makin terpadunya sektor pertanian dengan sektor industri, dan jasa, serta terbentuknya jaringan kegiatan agroindustri dan agrobisnis yang produktif.

Kebijaksanaan untuk mencapai sasaran tersebut, antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan efisiensi sistem produksi pertanian, dan mengembangkan iklim usaha yang sehat untuk meningkatkan investasi di bidang pertanian, terutama untuk mendukung pengembangan usaha pertanian.
- 2) Menjaga kestabilan harga pangan.
- 3) Mengembangkan usaha pertanian rakyat terpadu melalui sistem agro bisnis, termasuk mengembangkan sistem lembaga keuangan di pedesaan, meningkatkan penyediaan sarana produksi, dan mengembangkan kelembagaan pemasaran, serta meningkatkan peranan koperasi di pedesaan/KUD.
- 4) Menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan jaminan kepastian berusaha.



- 5) Mendorong investasi di bidang usaha pertanian di daerah tertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia dan di daerah tertinggal lainnya di kawasan barat Indonesia
- 6) Meningkatkan rehabilitasi tanah kritis, lahan pertanian yang diterlantarkan serta mencegah pengerusakan dan pencurian sumber daya kelautan.

c. Bidang Pengairan

Sasaran pembangunan pengairan adalah:

- 1) Terwujudnya penyediaan air yang cukup dan merata bagi kelangsungan kehidupan manusia dan kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang di cerminkan oleh tersedianya air yang cukup bagi kehidupan masyarakat.
- 2) Terwujudnya sistem alokasi air yang efisien dan efektif serta adil, baik antara sektor maupun antar wilayah.
- 3) Terpeliharanya kelestarian sumber air dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Kebijaksanaan yang di tempuh dibidang pengairan adalah:



- 1) Meningkatkan efisiensi peningkatan dan pengalokasian air.
- 2) Memantapkan prasarana pengairan, meningkatkan pemanfaatan sumber daya air.
- 3) Mengendalikan kerusakan lingkungan hidup.
- 4) Memantapkan kelembagaan pengairan.

d. Bidang Pangan dan Perbaikan Gizi

Sasaran pembangunan pangan adalah:

- 1) Pada tingkat rumah tangga, yang antara lain tercermin dari tersedianya pangan.
- 2) Terwujudnya keseimbangan pangan, dengan tersedianya berbagai komoditas pangan dan pangan olahan.
- 3) Terjaminnya keamanan pangan yang cirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Sasaran perbaikan gizi adalah:

- 1) Terwujudnya keadaan gizi yang tinggi di masyarakat yang tercermin dari pola konsumsi pangan masyarakat yang beraneka ragam dan bermutu gizi seimbang.



- 2) Tercapainya penurunan terhadap tingkat penyakit akibat kelebihan gizi seperti; jantung, tekanan darah tinggi dan kanker.
- 3) Turunnya secara bermakna berbagai jenis penyakit gizi kurang, terutama bayi, anak balita dan ibu hamil sehingga tidak lagi menjadi masalah gizi masyarakat.

Kebijaksanaan perbaikan gizi yang ditempuh:

- 1) Meningkatkan penyuluhan gizi masyarakat.
- 2) Meningkatkan upaya penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium, vitamin A, dsb.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan upaya perbaikan gizi.
- 4) Meningkatkan kegiatan penelitian unggulan di bidang pangan dan gizi.
- 5) Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam upaya perbaikan gizi masyarakat.

e. Bidang Tenaga Kerja

Pokok pembangunan ketenagakerjaan adalah:

- 1) Terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja dan mengurangi setengah pengangguran.



- 2) Berkurangnya kesengajaan produktivitas antar sektor dan meningkatkannya pemerataannya kesempatan antar daerah.
- 3) Berkurangnya secara absolut pekerja di sektor pertanian dan meningkatkan kesempatan kerja di sektor industri jasa dan lainnya.
- 4) Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang di tunjukan oleh profesionalisme kemandirian, etos, dan produktivitas yang makin meningkat.
- 5) Terciptanya kelembagaan ketenagakerjaan yang mantap dalam rangka terwujudnya hubungan industri.

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, pada pokoknya pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan adalah:

- 1) Pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan produktivitas di semua sektor antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengembangkan sistem keterpaduan antara dunia pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sepadan dengan kebutuhan pasar kerja.
- 2) Peningkatan kualitas tenaga kerja antara lain dengan mengupayakan adanya kemitraan



pelatihan tenaga kerja antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja.

- 3) Pendayagunaan tenaga kerja produktif melalui program khusus bagi kelompok angkatan kerja tertentu, seperti tenaga muda terdidik, penganggur dan setengah menganggur.
- 4) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan hubungan Industrial Pancasila yang serasi dan didukung oleh perbaikan syarat=syarat kerja dan perlindungan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita dan anak yang terpaksa bekerja.

f. Sektor Perdagangan

Sasaran pembangunan perdagangan adalah; terwujudnya sistem perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang mantap sebagai ciri perekonomian yang mandiri dan andal.

Kebijakan perdagangan dalam negeri pada pokoknya meliputi:

- 1) Upaya memantapkan dan memperluas pasar; meningkatkan perlindungan terhadap konsumen; menciptakan persaingan usaha yang



sehat yang melindungi pengusaha dan pedagang menengah dan kecil.

- 2) Mengembangkan kewirausahaan pengusaha dan perdagangan menengah dan kecil; dan meningkatkan peran koperasi di sektor perdagangan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan perdagangan luar negeri pada pokoknya adalah:

- 1) Meningkatkan daya saing komoditas ekspor.
- 2) Meningkatkan struktur ekspor non migas.
- 3) Memperluas negara tujuan ekspor.
- 4) Meningkatkan informasi usaha.
- 5) Mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan.
- 6) Meningkatkan fasilitas perkreditan ekspor.
- 7) Meningkatkan peran dan partisipasi aktif Indonesia dalam kerja sama perdagangan.
- 8) Meningkatkan kemampuan ekspor pengusaha dan perdagangan menengah dan kecil.
- 9) Mengendalikan impor.

g. Transportasi

Sasaran pembangunan transportasi adalah: mendukung terciptanya perekonomian yang andal



dan mandiri melalui penyelenggaraan sistem transportasi nasional yang efisien.

Untuk mewujudkan berbagai sasaran pembangunan transportasi di upayakan untuk:

- 1) Mengembangkan sistem transportasi nasional yang andal, berkemampuan tinggi, terpadu dan efisien.
- 2) Mengembangkan transportasi regional dengan perhatian khusus kepada daerah tertinggal, terutama kawasan timur daerah Indonesia.
- 3) Mengembangkan transportasi perkotaan.
- 4) Mendukung pembangunan industri, pertanian, perdagangan dan pariwisata.
- 5) Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
- 6) Meningkatkan peran serta masyarakat; mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi.
- 7) Meningkatkan daya saing transportasi nasional.

h. Pertambangan

Sasaran pembangunan pertambangan adalah:

- 1) Mendukung terciptanya perekonomian nasional yang mandiri dan andal melalui penggunaan



sumber daya alam mineral dan energi secara hemat dan optimal serta berwawasan lingkungan.

- 2) Dalam rangka itu diharapkan bahwa seluruh informasi dasar geologi, baik berupa peta dasar geologi maupun informasi bencana alam geologis dan lingkungan hidup telah tersedia.
- 3) Diharapkan telah tercapai tingkat kemandirian yang tinggi melalui penguasaan pengetahuan dan teknologi.
- 4) Peningkatan manajemen usaha pertambangan.

Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut dilakukan kebijaksanaan pembangunan pertambangan yang pada pokoknya adalah:

- 1) Mengembangkan informasi geologi dan sumber daya mineral sebagai pendukung dasar pembangunan pertambangan.
- 2) Memantapkan penyediaan komoditas mineral dan energi melalui peningkatan produksi.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dalam pembangunan pertambangan.
- 4) Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi



pertambangan guna mendukung peningkatan efisien dan produktivitas usaha pertambangan.

- 5) Mengembangkan iklim usaha, kemitraan berusaha, serta sistem pendukung lainnya bagi peningkatan efektivitas pembangunan pertambangan.

i. Bidang Kehutanan

Sasaran pembangunan kehutanan adalah; terwujudnya keseimbangan fungsi hutan sebagai sumber daya pertambangan dan penyangga sistem kehidupan secara lestari dan efisien melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran serta peran serta aktif masyarakat luas.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, kebijaksanaan pembangunan kehutanan pada pokoknya meliputi:

- 1) Upaya untuk memantapkan kawasan hutan dan meningkatkan mutu serta produktivitas hutan negara dan hutan rakyat, meningkatkan mutu dan produktivitas pengelolaan hutan dan hasil hutan.
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan menanggulangi kemiskinan sekitar hutan serta meningkatkan pendapatan daerah tertinggal.



- 3) Meningkatkan peran serta koperasi, usaha menengah, kecil, dan tradisional dalam pembangunan kehutanan, melestarikan hutan sebagai pelindung lingkungan hidup dan ekosistem.
- 4) Meningkatkan kemampuan hutan daerah.

j. Usaha Nasional

Sasaran pengembangan usaha nasional adalah:

- 1) Terwujudnya struktur dunia usaha nasional yang makin kukuh dan makin berimbang sehingga usaha koperasi, usaha swasta, dan usaha negara dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan amanat demokrasi ekonomi.
- 2) Di samping itu, menjadi sasaran pula terciptanya lapisan pengusaha menengah yang makin besar jumlahnya dan lapisan pengusaha kecil serta koperasi yang makin kuat, tangguh dan berperan dalam perekonomian nasional.
- 3) Terwujudnya Indonesia sebagai niaga yang andal dan mantapnya daya saing usaha nasional di pasar dunia.
- 4) Serta seimbangya penyebaran investasi antar daerah, antar sektor dan antar golongan ekonomi.



Pokok kebijaksanaan pengembangan usaha nasional untuk mencapai berbagai sasaran tersebut adalah:

- 1) Menata struktur dunia usaha yang lebih seimbang, merata berkeadilan, kukuh dan mandiri antara lain dengan membina dan melindungi usaha kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah dan mengembangkan menjadi usaha kecil yang tangguh.
- 2) Meningkatkan kemampuan pengusaha menengah dan kecil, yang merupakan bagian terbesar dari pengusaha nasional, melalui peningkatan prakarsa, etos kerja, dan peran sertanya dalam segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
- 3) Meningkatkan daya saing usaha nasional, melalui peningkatan kerja sama, keterkaitan dan kemitraan usaha yang luas antara badan usaha koperasi, negara dan swasta.
- 4) Meningkatkan dan menyebarkan investasi dengan memobilisasi dana pembangunan, menciptakan iklim investasi yang mendukung, serta memberi kemudahan dan insentif fiskal dan moneter yang menarik, terutama investasi di



kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya.

- 5) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas serta memantapkan peran **BUMN** dengan meningkatkan kemampuan penyelenggara dan pengelolaannya, termasuk peningkatan daya saingnya, memberi kesempatan kepada **BUMN** untuk mengembangkan usaha sesuai dengan fungsi dan peranannya secara mandiri, serta mendorong keikutsertaan **BUMN** dalam mengembangkan dan melindungi usaha menengah dan kecil.

k. Pariwisata

Sasaran pembangunan kepariwisataan adalah: Mantapnya pariwisata sebagai sektor andalan yang membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut pokok kebijaksanaan kepariwisataan meliputi berbagai upaya untuk meningkatkan pariwisata sebagai sektor andalan, meningkatkan daya saing kepariwisataan nasional, mengembangkan pariwisata nusantara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kepariwisataan, dan



meningkatkan peran serta koperasi, usaha swasta terutama menengah dan kecil, serta masyarakat pada umumnya.

I. Pos dan Telekomunikasi

Sasaran pembangunan pos dan telekomunikasi adalah:

- 1) Kukuhnya kemampuan pos dan telekomunikasi untuk mendukung perekonomian yang mandiri dan andal.
- 2) Semua kecamatan, kawasan potensial perkotaan dan pedesaan yang ada dapat dilayani dengan fasilitas fisik pelayanan pos.
- 3) Pelayanan pos komersial dan pelayanan pos cepat sudah menjangkau semua kantor pos.
- 4) Pelayanan pos elektronik telah mencakup semua kantor pos potensial.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh berbagai kebijaksanaan yang pokok-pokoknya adalah meningkatkan:

- 1) Jangkauan pelayanan.
- 2) Pemerataan pelayanan.
- 3) Peran serta koperasi dan swasta.
- 4) Efisiensi dan penerapan iptek dalam penyelenggaraan telekomunikasi.



- 5) Penggunaan radio dan satelit.
- 6) Kualitas sumber daya manusia.
- 7) Telekomunikasi khusus dan telekomunikasi Hankam.

m.Koperasi

Sasaran pembangunan koperasi adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang merupakan wadah untuk menggalang ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Meningkatkan lingkup pembangunan koperasi sangat luas dan terkait dengan berbagai sektor pembangunan lainnya, pelaksanaan kebijaksanaan di atas dilakukan secara terpadu dan selaras dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian di sektor tersebut. Berbagai kebijaksanaan tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok



masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

n. Kelautan

Sasaran pembangunan kelautan adalah:

- 1) Terwujudnya kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia dalam wawasan nusantara.
- 2) Terciptanya industri kelautan yang kuat dan maju yang didorong oleh kemitraan usaha yang kukuh antar badan usaha koperasi, negara, swasta serta pendayagunaan sumber daya kelautan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maju dan profesionalisme dengan iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terwujud kemampuan untuk mendayagunakan potensi laut guna peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.
- 3) Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup.

Berkenaan dengan sasaran tersebut, pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan kelautan adalah:

- 1) Menegakkan kedaulatan dan keadilan sosial.
- 2) Mendayagunakan potensi laut dan dasar laut.



- 3) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan.
- 4) Mengembangkan potensi berbagai industri kelautan nasional dan penyebarannya di seluruh wilayah tanah air.
- 5) Memenuhi kebutuhan data dan informasi kelautan serta memadukannya serta mengembangkannya dalam suatu jaringan sistem informasi geografis kelautan.
- 6) Mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan hidup laut.

o. Kedirgantaraan

Sasaran sektor kedirgantaraan adalah terwujudnya pengakuan dan tegaknya kedaulatan atas dirgantara nasional dan pengakuan internasional atas kepentingan Indonesia dalam pendayagunaan dirgantara secara menyeluruh, terwujudnya kemampuan pemanfaatan wilayah dan sumber daya dirgantara, dan terwujudnya kemandirian industri kedirgantaraan.

Berkenaan dengan sasaran tersebut, kebijaksanaan pembangunan kedirgantaraan pada pokoknya adalah:

- 1) Menegakkan kedaulatan atas wilayah dirgantara nasional.



- 2) Mengembangkan potensi industri dirgantara.
- 3) Mencakupi kebutuhan transportasi udara dan menjamin keselamatan penerbangan.
- 4) Menjamin kelestarian fungsi lingkungan dirgantara.

p. Keuangan

Sasaran pembangunan keuangan adalah:

- 1) Meningkatkan tabungan nasional yang meliputi tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat.
- 2) Tabungan pemerintah meningkat dalam kerangka kebijaksanaan fiskal yang tetap berdasarkan pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis yang menjamin pemerataan pembangunan yang meluas, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis.
- 3) Tabungan masyarakat terus meningkat melalui kebijaksanaan moneter yang di dukung kebijaksanaan di bidang lain, yang menjamin kestabilan nilai mata uang dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan lembaga keuangan dan



perbankan yang efisien dan makin meluas jangkauannya.

- 4) Sumber dana luar negeri merupakan pelengkap, dengan prinsip peningkatan kemandirian.

Untuk mencapai sasaran keuangan akan ditempuh kebijaksanaan:

- 1) Penerimaan pajak dan bukan pajak.
- 2) Mengoptimalkan pengeluaran rutin.
- 3) Meningkatkan efektivitas pengeluaran pembangunan.
- 4) Memantapkan stabilitas harga.
- 5) Meningkatkan efisiensi lembaga keuangan.

q. Transmigrasi

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatkan pendapatan transmigrasi dan masyarakat di daerah transmigrasi sekurang-kurangnya setingkat dengan pendapatan rata-rata nasional.
- 2) Berkembangnya berbagai kegiatan usaha, seperti agrobisnis, agroindustri, dan koperasi yang tangguh di luar jawab yang dapat menjadi daya tarik transmigrasi swakarsa mandiri.



- 3) Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah transmigrasi, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan setaraf dengan rata-rata nasional.
- 4) Berbaurnya masyarakat setempat di daerah transmigrasi dengan para transmigran.
- 5) Berkurangnya penduduk di kawasan rawan atau daerah padat penduduk yang mengganggu ekosistem.
- 6) Berkurangnya kesenjangan baik antar golongan masyarakat maupun antar wilayah serta berkembangnya kondisi sosial ekonomi wilayah sehingga kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara makin kukuh.

Untuk mencapai sasaran tersebut pokok kebijaksanaan adalah:

- 1) Mengarahkan transmigrasi ke kawasan timur Indonesia.
- 2) Mendukung pengembangan wilayah.
- 3) Membantu mengentaskan penduduk dari kemiskinan.
- 4) Mendorong transmigrasi swakarsa mandiri.



- 5) Mengembangkan agrobisnis, agroindustri dan usaha lain di daerah transmigrasi.
- 6) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan transmigrasi.
- 7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta memanfaatkan iptek.

r. Energi

Sasaran utama pembangunan energi adalah: terjaminnya kemandirian dalam energi yaitu; tercapainya suatu kondisi dinamis yang mampu mengimbangi kebutuhan energi yang meningkat dengan menjamin penyediaan dengan mutu dan pelayanan yang memadai sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kebijaksanaan yang di tempuh untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan energi termasuk tenaga listrik pada pokoknya adalah:

- 1) Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya energi.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguasa teknologi.
- 3) Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dalam pemanfaatan energi.



s. Lingkungan Hidup

Sasaran pembangunan lingkungan hidup adalah: tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan dukungan fungsi lingkungan hidup dalam pembangunan yang mandiri dan andal.

Berdasarkan sasaran tersebut kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup adalah:

- 1) Mengarahkan agar dalam memilih lokasi untuk pembangunan senantiasa dijaga supaya tidak mengurangi fungsi dan mutu lingkungan.
- 2) Mengurangi produksi limbah.
- 3) Mengelola limbah secara terpusat dan memadai.
- 4) Menetapkan baku mutu lingkungan.
- 5) Melestarikan alam dan merehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 6) Mengembangkan kelembagaan peran serta masyarakat dan kemampuan sumber daya manusia.



B. KEBIJAKAN REGIONAL

1. Kebijaksanaan Pembangunan Daerah

Sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam GBHN adalah: mantapnya daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta makin meratanya pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatnya kesejahteraan rakyat.³⁴

Untuk lebih jelasnya sasaran pembangunan daerah tersebut antara lain:

- a. Berkembangnya ekonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II.
- b. Meningkatkan kemandirian dan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan didaerah.
- c. Tercapainya sasaran perekonomian nasional dan daerah untuk lebih menyeimbangkan ekonomi antar daerah, desa, antar kawasan, serta antar kota.
- d. Makin terakomodasinya pembangunan antar sektor dan antar sektor dengan pembangunan daerah.

³⁴ Syaiful Bakhri, *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundangundangan*, (Jakarta: Kreasi TotalMedia, 2012), hal. 86



- e. Meningkatnya dan makin selarasnya peranan daerah pedesaan dalam pembangunan nasional dan daerah dalam menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah.
- f. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat termasuk makin berkurangnya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal di perkotaan dan di pedesaan.
- g. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
- h. Makin mantapnya lembaga perekonomian daerah, mulai dari pedesaan.
- i. Telah tersedianya rencana tata ruang yang efektif, operasional dan diketahui masyarakat luas.
- j. Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- k. Berkembangnya budaya daerah seiring dengan perkembangan nilai budaya baru akibat kemajuan dalam masyarakat.
- l. Berkembangnya manfaat teknologi dalam masyarakat.



Untuk mewujudkan sasaran dalam pembangunan daerah, dikembangkan berbagai kebijaksanaan antara lain :

- a. Meningkatkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, memantapkan penyelenggaraan urusan yang telah menjadi urusan otonom daerah TKI maupun TK II.
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur, kelembagaan dan keuangan pemerintah.
- c. Meningkatkan keserasian pertumbuhan antar daerah, antara lain dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara daerah dengan mengembangkan potensi sesuai dengan kondisi daerah.
- d. Meningkatkan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah dalam rangka memacu pertumbuhan melalui pemerataan dan dengan menciptakan keterkaitan fungsional antar daerah, antar wilayah, antar kota, antar desa, dan kota.
- e. Kebijakan lain yang seiring adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah dengan memerikan kemudahan di daerah tingkat I dan tingkat II untuk menciptakan iklim usaha makin



baik, meningkatkan investasi ekspor non migas, peranan dan pertumbuhan usaha menengah kecil, termasuk koperasi dan penciptaan tenaga kerja.

- f. Pengembangan peranan wanita dan pemuda dalam pembangunan yang dilaksanakan dengan mendorong dan membina organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita dan pemuda lembaga perekonomian rakyat termasuk koperasi, lembaga tradisional dan lembaga lainnya.
- g. Memantapkan pembangunan perangkat penataan ruang dalam pembangunan daerah sedemikian rupa sehingga pemanfaatan ruang dalam mengisi pembangunan di daerah dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.
- h. Mengembangkan budaya daerah dalam rangka memperkuat jati diri bangsa serta menunjang pembangunan nasional, antar lain di bidang pendidikan dan kepariwisataan.
- i. Mengembangkan pemanfaatan teknologi dengan mengembangkan sumber daya manusia.

2. Pembiayaan Pembangunan Daerah

Keuangan negara dapat diartikan sebagai kegiatan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara



oleh pemerintah atau kegiatan melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara untuk melaksanakan kegiatan rutin dan pembangunan. Pengertian dalam arti sempit ini memberikan gambaran bahwa keuangan negara ialah kegiatan pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana dan mengeluarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dan saat ini perkembangan kegiatan keuangan negara telah menjadi makna luas sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat dan pembangunan, yang mana keuangan negara tidak lagi melakukan kegiatan pengelolaan penerimaan pengeluaran negara saja namun lebih luas lagi yaitu: di samping penyediaan pelayanan umum juga melayani kebutuhan akan barang dan jasa yang menjadi hakikat hidup orang banyak seperti jasa-jasa pelayanan kereta api, telepon, listrik, air, dsb. Sesuai dengan pengertian keuangan negara di atas, lingkup keuangan negara pada prinsipnya mencakup kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Pengelolaan sumber-sumber keuangan negara dengan pajak sebagai penerimaan utama.
- b. Pengelolaan pinjaman negara dan pelunasannya.
- c. Pengelolaan pengeluaran negara.
- d. Penatausahaan keuangan negara.



- e. Pengelolaan dan perumusan kebijaksanaan fiskal yang pada prinsipnya mengembangkan peranan keuangan negara atas pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga, dan juga efisiensi alokasi sumber-sumber daya.
- f. Pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan salah satu aspek keuangan negara yang akhir-akhir ini semakin penting, dan banyak mendapatkan perhatian pemerintah dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Ruang lingkup permasalahan hubungan keuangan antara tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat kompleks dan dapat disederhanakan menjadi 5 pokok permasalahan, yaitu :

- a. Asas pembiayaan daerah.
- b. Pajak pusat dan pajak daerah.
- c. Bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah.
- d. Subsidi, sumbangan dan bantuan.
- e. Pinjaman daerah.

Berdasarkan desentralisasi, semua urusan pemerintah daerah, baik mengenai belanja pegawai dan operasional daerah harus dibiayai melalui APBN.



Dalam hal ini tidak berarti pemerintah daerah harus mempunyai penerimaan Sali daerah (pajak dan retribusi) yang dapat mencukupi segala pengeluaran tersebut, akan tetapi dari penerimaan daerah berupa subsidi atau bagi hasil dari pusat. Subsidi yang diterima oleh daerah pusat itu pada umumnya bersifat bebas (*block grant*) dimana penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.





BAB VII

***STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI
dan PENDAPATAN NASIONAL DAN
KEMISKINAN***



BAB VII

STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI dan PENDAPATAN NASIONAL DAN KEMISKINAN



A. STRUKTUR PRODUKSI

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema.³⁵

³⁵ Fandy Tjiptono, Analisa Kepuasan Pelanggan Sebagai Dasar Penyusunan Strategi Pemasaran Defensif Pada Novel Computer Yogyakarta, Skripsi (tidak dipublikasikan), FE UGM, 1994



Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

- 1) Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang-barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
- 2) Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
- 3) Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah yang di sebut dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu.³⁶

³⁶ A.R. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif abad 21,(Magelang: Tera Indonesia,1998), hlm. 245



Pendapatan nasional sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :

- 1) Menentukan laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu negara.
- 2) Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya.
- 3) Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya.

Meskipun demikian tidak semua ahli ekonomi setuju jika hanya pendapatan per kapita saja yang dijadikan ukuran kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Adapun kritik tersebut diantaranya adalah :

- 1) Ada faktor-faktor lain di luar pendapatan yang akan berpengaruh pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.
1. Kesejahteraan masyarakat masih sering bersifat subjektif. Tiap orang mempunyai pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur kesejahteraannya pun berbeda.

Beberapa tokoh ekonomi yang memberikan masukan terhadap ukuran-ukuran kemakmuran dan kesejahteraan diantaranya adalah :

Dudley seers mengemukakan, bahwa paling tidak ada 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam



mengukur tingkat pembangunan suatu negara. 3 masalah tersebut adalah :

- 1) Tingkat kemiskinan
- 2) Tingkat pengangguran
- 3) Tingkat ketimpangan di berbagai bidang

J.L Tamba, berpendapat bahwa ada 4 hal sebagai dasar untuk mengukur perekonomian dan kemakmuran di Indonesia. 4 hal tersebut adalah :

- 1) Kesehatan dan keamanan
- 2) Pendidikan keahlian dan standart hidup
- 3) Pendapatan
- 4) Pemukiman

Hendra esmara, lebih memilih 3 komponen yang ia anggap perlu diperhatikan dalam rangka mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara, yakni :

- 1) Penduduk dan kesempatan kerja
- 2) Pertumbuhan ekonomi
- 3) Pemerataan dan kesejahteraan masyarakat

Untuk mendapatkan nilai atau angka indikator tersebut digunakan tiga pendekatan perhitungan, yakni :

- 1) Pendekatan produksi
- 2) Pendekatan pengeluaran
- 3) Pendekatan pendapatan



Sedangkan konsep perhitungan yang dipergunakan adalah :

- a) Konsep kewarganegaraan, dan
- b) Konsep kewilayahan.

1. Menghitung pendapatan nasional Indonesia dengan pendekatan produksi (GDP)

GDP (*Gross Domestic Product*) atau Produksi Domestik Bruto adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua pelaku/sector ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.

Yang perlu diingat dalam perhitungan tersebut, jangan sampai terjadi perhitungan ganda yang dapat menyebabkan pendapatan nasional Indonesia tampak lebih besar. Salah satu akibatnya adalah, seolah-olah negara Indonesia sudah cukup maju dan makmur, sehingga bantuan dari luar negeri akan dialihkan ke negara yang lebih membutuhkan. Dengan demikian kita akan kehilangan kesempatan mendapatkan tambahan dana pembangunan, sedangkan kita sesungguhnya masih sangat membutuhkannya.



Untuk menghindari kesalahan perhitungan ganda tersebut dapat digunakan salah satu dari dua cara di bawah ini :

- ✓ Pertama, GDP dihitung hanya dari nilai akhir dari suatu produk saja, misalnya untuk industri otomotif, hasil akhirnya saja yang akan dihitung.
- ✓ Kedua, dengan menjumlahkan nilai tambah dari masing-masing komoditi yang dihasilkan oleh masing-masing produsen, maka pendapatan nasional Indonesia dengan cara ini akan menghasilkan jumlah yang sama .

2. Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

$$\mathbf{GNP = GDP - Produk\ neto\ terhadap\ luar\ negeri}$$



3. *Produk Nasional Neto (NNP)*

Produk Nasional Neto (*Net National Product*) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut *replacement*). *Replacement* atau penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

$$NNP = GNP - \text{Penyusutan}$$

4. *Pendapatan Nasional Neto (NNI)*

Pendapatan Nasional Neto (*Net National Income*) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

$$NNI = NNP - \text{Pajak tidak langsung}$$



5. *Pendapatan Perseorangan (PI)*

Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman (*transfer payment*).

$$PI = (NNI + \text{transfer payment}) - (\text{Laba ditahan} + \text{Iuran asuransi} + \text{Iuran jaminan sosial} + \text{Pajak perseorangan})$$

6. *Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)*

Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. *Disposable income* ini diperoleh dari *personal income* (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (*direct tax*) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.



$$DI = PI - \text{Pajak langsung}$$

7. Pendapatan Nasional Perkapita

Pendapatan per kapita (*per capita income*) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut.

B. DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL DAN KEMISKINAN

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya



distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relatif tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.

Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun



pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.

Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan”

hasil pembangunan ke bawah (*trickle down*) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan



penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi persentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.

Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecenderungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.

C. DISTRIBUSI PENDAPATAN

Ukuran distribusi pendapatan lain, yang sering digunakan oleh para ekonom adalah distribusi fungsional



atau distribusi pangsa faktor produksi.³⁷ Ukuran distribusi ini berusaha untuk menjelaskan pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Di samping memandang individu-individu sebagai kesatuan yang terpisah, teori ukuran distribusi pendapatan fungsional tersebut menyelidiki persentase yang diterima tenaga kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan persentase dari pendapatan nasional yang terdiri dari : *sewa, bunga, dan laba*.

Gambar di bawah ini memberikan gambaran yang sederhana dari teori distribusi fungsional tradisional. Misal dalam perekonomian hanya ada 2 faktor produksi yaitu modal yang merupakan faktor produksi tetap dan tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi variabel.³⁸

Berdasarkan asumsi pasar persaingan, permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh Marginal Product-nya (VMP_L) sama dengan tingkat upah riil. Tetapi, sesuai dengan prinsip marginal produk yang menurun, permintaan akan tenaga kerja ini akan merupakan suatu fungsi yang menurun dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Kurva permintaan akan tenaga kerja yang

³⁷ Hadari Nawawi, Evaluasi dan Manajemen Kinerja Di Lingkungan Perusahaan dan Industri, ...hal 62

³⁸ Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Jakarta: PT grafindo Persada, 2012. hal. 95



berslope negatif tersebut ditunjukkan oleh D_L . Sedangkan kurva penawaran tenaga kerja adalah S_L , dan tingkat upah keseimbangan akan sama dengan tingkat keseimbangan penggunaan tenaga kerja.³⁹

³⁹ Abu Fahmi Dkk, HRD Syari'ah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, hal. 179



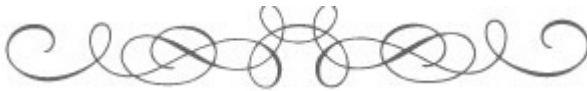


BAB VIII
KEMAKMURAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



BAB VIII

KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



A. KEMISKINAN

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan



merupakan dua masalah besar dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.⁴⁰

Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa setelah 10 tahun berlalu pada tahun 1969, ternyata efek yang dimaksud itu mungkin tidak tepat untuk dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Akhirnya, sebagai akibat dari strategi tersebut, pada dekade 1980-an hingga pertengahan dekade 1990-an, sebelum krisis ekonomi, Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto yang relatif tinggi, tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak.

1. Definisi Kemiskinan

- Menurut Sallatang (1986) kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial.
- Menurut Esmara (1986) mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang

⁴⁰ Abdul manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 353-354



layak. Fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

- Menurut Basri (1995) bahwa kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya.
- Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan.
- Poli (1993) menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan ketidakterjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif, ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku anti sosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik,
- kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan.



- Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin

SPECKER (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal
- b. Gangguan dan tingginya risiko kesehatan,
- c. Risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya,
- d. Kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak, dan
- e. Kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidik yang rendah.

Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin,



dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik.

INDIKATOR

NO.	INDIKATOR	KAYA	SEDANG	MISKIN
1	Rumah	Batu	Kayu	Bambu
	a. Atap	Seng / Tegel	Seng	Seng bekas
	b. Dinding	Batu	Papan/tembok	Gamacca
	c. Lantai	Tegel	Papan/semen	Tanah
	d. WC	Ada	Ada	Tidak ada
2	Fasilitas	Ada / lengkap	Kurang	Tidak ada
	a. TV	TV warna	TV hitam putih	Tidak ada
	b. Radio	Radio Tape	Radio baterai	Tidak ada
	c. Listrik	Ada	Ada	Tidak ada
3	Pendapatan (Rp/ bulan)	800.000 ke atas	400.000-750.000	150.000-300.000
4	Pendidikan	SMP/SMA ke atas	SD/SMP	Tidak sekolah/SD
5	Status kepemilikan	Milik sendiri	Menumpang	Tidak ada
	a. Kepemilikan lahan	1 Ha ke atas	10 a – 1 ha	0-5 a
	b. Kepemilikan ternak	5 ekor sapi ke atas	2-4 ekor sapi	Ayam / 1 ekor sapi
	c. Kepemilikan kendaraan	Mobil	Motor	Tidak ada
6	Kesehatan	Rumah Sakit	Pustu/mantra kesehatan	Sanro/dukun
7	Pola makan	3x sehari/beras/daging	2x sehari/beras/jagung/ikan bolu	2x sehari/ beras/ jagung/ ikan teri/daun singkong



2. Penyebab Kemiskinan

- ✓ Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.
- ✓ Kebijakan dalam negeri sering kali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung

- a. Tingkat kemiskinan cukup banyak.
- b. Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas tenaga kerja).
- c. Tingkat inflasi.
- d. Tingkat Investasi.
- e. Alokasi serta kualitas sumber daya alam.
- f. Tingkat dan jenis pendidikan.
- g. Etos kerja dan motivasi pekerja



4. Ukuran Kemiskinan

✓ **Kemiskinan Absolut**

Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (*basic need*).

Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :

- 1) Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

✓ **Kemiskinan Relatif**

Menurut Kincaid (1975) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.

5. Strategi dalam Mengurangi Kemiskinan

a. Pembangunan Sektor Pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat di pedesaan berarti akan



mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.

b. Pembangunan Sumber Daya manusia

Sumber daya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah.

c. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan dan program pengentasan kemiskinan

B. KESEJAHTERAAN

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam



perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal, yang haram pun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup.

Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Lebih jauh sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari **ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas**, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tak perlu juga melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai



kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu.

Adapun indikator tersebut diantaranya adalah.

✓ ***Pertama.*** *Jumlah dan pemerataan pendapatan:*

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

✓ ***Kedua,*** *Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau.*

Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan



yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya.

Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan



kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

✓ ***Ketiga, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.***

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.



Teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kegiatan dan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas, dihadapkan kepada alat-alat pemuas kebutuhan yang ersedinya terbatas atau langka.

Dari definisi ekonomi diatas, terdapat dua faktor yang mempengaruhi manusia dalam perekonomian, yaitu :

a. Kebutuhan yang tidak terbatas.

Kebutuhan manusia terhadap barang-barang dan jasa bersifat tidak terbaas baik dari jumlah maupun mutunya, misalnya :

- ✓ Kebutuhan akan pangan, ingin makanan yang bervariasi, bergizi, dsb.
- ✓ Kebutuhan akan sandang, ingin pakaian sesuai mode, dsb.
- ✓ Kebutuhan akan papan, ingin rumah yang bagus, mewah, dsb.

b. Sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas atau langka.

Alat-alat pemuas kebutuhan manusia adalah barang dan jasa. Kelangkaan barang dan jasa tersebut yang menyebabkan manusia harus melakukan pengorbanan dalam bentuk waktu, tenaga, dan biaya untuk memperolehnya. Memang ada pemuas



kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya serta tidak memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya, yaitu :udara, sinar matahari dsb.

Ukuran kemakmuran dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Terpenuhinya kebutuhan akan pangan sehari tiga kali dengan gizi yang cukup.
- b. Pakaian dapat disediakan untuk berbagai keperluan dan sesuai mode antara lain ; pakaian kerja, pakaian sekolah, pakaian tidur, pakaian pesta, dsb.
- c. Perumahan, dengan ruang tidur yang cukup, ruang keluarga, kamar mandi dan dapur serta ruang-ruang lain yang diperlukan dan memberikan kehidupan yang sehat kepada keluarga.
- d. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang sakit, pendapatan mereka cukup untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
- e. Memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai anak-anak sampai pada tingkat pendidikan yang tinggi.



Itulah indikator tentang kesejahteraan rakyat. Indikator ini akan menjadi faktor penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraan. Hal tersebut diyakini merupakan puncak dari gunung es kesejahteraan yang didambakan oleh semua orang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2005. Analisis Investasi. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Aduarsus, Tandelilin. 2012. Fortopolio dan Investasi. Yogyakarta: Konisius
- Afif, Muhammad Fadhlil dkk. *Peradaban Islam di Tahiland*. (Sekolah Tinggi Negeri Kudus, Jum'at 22 Nov 2013).
- Afrida, BR. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Alfabeta
- Amir MS. 2004. Strategi Memasuki Pasar Ekspor, Jakarta: PPM
- Arief, Sritua, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, (Jakarta: Zaman, 1997)
- Arif, Saiful, *Menolak Pembangunanisme*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000)
- Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah,
- Artkel/Jurnal/Hasil Penelitian *Bureau of the Census, USA/USSR: Facts and Figures*, Washington D.C: U.S. Government Printing Ofce, 1991
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Cet. I (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012)



- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Sumbar Dalam Angka. Data
- Barimbing, Yesika Resianna dan Ni Luh Karmini. 2015. Pengaruh PAD, Tenaga
- Basri, Syrafil. 2005. Teori Pengeluaran Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka
- Bawuno, Eunika Elisabeth. Josep Bintang Kalangi dan Jacline I. Sumual. 2015. Pengaruh Investasi Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan
- Bina Aksara.
- Binaman Pressindo
- Binarupa Aksara.
- Boediono, Dr., *Ekonomi Internasional, Edisi Pertama, BPFE*, Yogyakarta, 1994.
- Boediono. 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta : BPFE
- Boediono. 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE
- BPFE Yogyakarta
- Cahyono, Yeni dan Edy Kurniawan. (2016). *Perkembangan Perekonomian Syari'ah Pada Masyarakat Ponorogo*. Muaddib 06 (02).
- Daerah). Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Daerah. Andi. Yogyakarta
- Dermawan, Wibisono, 2003. Riset Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Developing Countries. International Journal of Economics and Financial
- Development Data Group, *World Development Indicators 2012*, Wasington D.C: The World Bank, 2012



- Development Data Group, *World Development Indicators 2016*, Wasington D.C: The World Bank, 2016
- Djarwanto, PS. dan Subagyo Pangestu., 1998. Statistik Induktif. Jakarta: BPFE
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Indonesia.
economics. Vol 2, No. 6
- Edisi Ketiga. Alih Bahasa Chriswan Sungkono. Jakarta: Salemba Empat.
- Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga
- Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Ekonometrika. Universitas Indonesia.
- Ekonomi Di Kota Manado (Studi Pada Kota Manado tahun 2003-2012).
- Ekspor Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Semarang
- Ekuitas Vol. 15 No. 4 Desember 2011: 477 – 500.
- Elkhart Lake, (Wisconsin: Misty Valley Publishing, 1990)
- Empiris, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi
- Gilarso, *Pegantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta:KANSIUS,2004)h.15
- Gramedia Pustaka Utama.
- Growth in Syria. International Journal of Management, accounting, and
- Gujarati, D.N. 2012. Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C..



- Gujarati, Damodar. 2003. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga
- H.R. Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Cet. VII* (Bandung: Refka Aditama, 2013)
- Halwani, Hendra. Dra. M.H., dan Tjiptohariyanto, Prijono, H. Dr., *Perdagangan Internasional, Pendekatan Ekonomi Makro & Mikro*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Hartono, Yogyianto. 2008. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta:
- Humiang, Maikel. Vikie Rimate dan Steeva Tumangkeng. 2015. *Analisis Indonesia 2000-2011 Investasi, Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di*
- Irawan dan M. Suparmoko. 1987. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Liberty.
- Irawan, Candra, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016)
- Irham dan Yogi. 2003. *Ekspor di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka
- Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010) h.1
- Issues. Vol 2. No. 2
- Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jakarta: Salemba Empat, buku 2, Edisi 5.



- Jaworski, Taylor and Price V. Fishback, "*World War II (Prepared for the Oxford Handbook of American Economic History)*", March, (2014)
- Jhingan, M.L, 1996. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali
- Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 15. No 04.
- Kabupaten Buleleng Periode 2008-2012. *Jurnal Manajemen*. Vol.3.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Cet. I (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011)
- Lyndolp, Paul E., *Geography of the U.S.S.R*. 5th Ed.
- Kerja, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Bali. *E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol 4, No 5.
- Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta
- Kesternich, Iris et. al, "*The Effects of World War II on Economic and Health Outcomes across Europe,*" *RAND Labor and Populaton Working Paper Series*, January 22, (2012)
- Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga
- Kholis, Nur. (2017). *Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia*. Millah : Jurnal Studi Agama, XVII (1).
- Kilavus, Emine dan Betul Altay Topcu. 2012. *Export and Economic Growth in*
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1994. *Kebijakan Publik Indonesia Substansidan*



- Mankiw, Gregory N. 2003. Teori Makro Ekonomi Terjemahan. Jakarta: PT.
- Mankiw, Gregory N. 2006. Principles of Economics. Pengantar Ekonomi Makro.
- Mankiw, Gregory N. 2007. Makroekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Mardiah, Nur Hilda. *Kepentingan Ekonmi Politik Singa pura Dalam Menerapkan Ekonomi Islam*. JOM FISIP, Vol.3 No.2.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Cet. I* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Mendorong Ekspor, Jurnal Manajemen, Vol.1, No.1, UII. Yogyakarta.
- Mohsen, Adel Shakeeb. 2015. Effect of Exports and Invesment on The Economic
- Mokodompis, Rafika. Vekie Rumate, dan Mauna Maramis. 2015. Pengaruh
- Mulyadi. 2006. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan.
- Nota Keuangan & Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik
- Nurkse, Ragnar. 1964. Masalah Pembentukan Modal di Negara-negara yang
- Pada Kota Manado 2003-2012). Jurnal Berkala Efisiensi, Vol 15, No 01
- Panjaitan, Saut P., *Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konsttusi Ekonomi*, (Jakarta: Jurnal Konsttusi, Volume 7, No. 2, April 2010)
- Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.



Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terhadap

Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado Tahun 2003-2012.
Manado:

Perusahaan. Rajagrafindo Persada. Jakarta

Praja, Juhaya S., *Teori Hukum dan Aplikasinya, Cet. I*
(Bandung : Pustaka Seta, 2011)

Prasetyo, Eko, *Kapitalisme & Neoliberalisme, Sebuah Tinjauan Singkat, Ekonomi Politik*, (Journal AlManar, Edisi I, 2004)

Pustaka LP3ES

Rahman, Arif. 2015. Stasioneritas, Akar Unit, dan Kointegrasi. Bahan Ajar Kuliah

Ratnawat, Tri, *Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?*, (Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010)

Richard, Lipsey. 1995. Pengantar Ekonomi Mikro (Terjemahan). Jakarta:

Rivai, Veithzal dan Basri. 2005. Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat

Rostow, W.W. "*The Stage of Economic Growth*", *Jstor Journal, The Economic History Review*, Second Series, Vol. 12, No. 1, (1959)

Sariningrum, Ambar. 2010. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan

sedang membangun terjemahan Hutagalung. Jakarta : Bhatara

Simanjuntak, 1998, Payaman, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia,



- Sjahdeini, Sultan Remi. *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Sjahrir, Dr., Moneter, *Perkreditan dan Neraca Pembayaran, Persoalan Ekonomi Indoensia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. II (Bandung: Pustaka Seta, 2009)
- Soejono dan H Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soeroto, 1986. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. BPFE- Pers, Yogyakarta.
- Strategis BPS
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:
- Suindyah D, Sayekti. 2011. *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran*
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sukirno, Sadono. 2005. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sunindhia, Y.W, dan Widiyanti, Ninik, 1988. *Manajemen Tenaga Kerja*. Jakarta:
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan*
- Supriyanto, *Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian*, (Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 6 No. 2, November 2009)



- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Edisi
- Susan J. Linz, "World War II and Soviet Economic Growth 1940-1953," *Faculty Working Paper No. 1038*, Bureau of Economics and Business Research (BEBR), University of Illinois, May, (1984)
- Susi, Luh Irma Dewi, I Ketut Kirya, dan Fridayana Yudiaatmaja. 2015. *Pengaruh*
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Penemuan*
- Tambunan, Tulus T.H., Dr., *Perekonomian Indonesia,, Teori dan temuan Empiris*, Ghalia Indonesia, 2001.
- Tambunan, Tulus T.H., Dr., *Perekonomian Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- the Case of the Manufacturing Industry: Panel Data Analysis of
- Tim Penyusun, *Atlas Status Mutu Air Indonesia Tahun 2015*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015)
- Tim Penyusun, *Statistik Indonesia: Statstcal Year Book of Indonesia 2017*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017)
- Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (H.Munandar, Trans.
- Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia*



- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I Edisi
- Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, diterjemahkan oleh Burhanuddin Abdullah dan Harris Munandar, Cet. II* (Surabaya: Penerbit Erlangga, 1989)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Universitas Sam Ratulangi
- Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing
- Urgensi. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Utomo, Yuni Priadi. 2000. *Ekspor Mendorong Pertumbuhan atau Pertumbuhan*
- Wahyu, Whidiarso. 2010. *Uji Linearitas Hubungan*. Yogyakarta: UGM
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi*

